



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi setiap potensi dan kejadian bencana alam diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal serta memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana yang berkelanjutan, diperlukan penyusunan rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2026 – 2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologi, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
5. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
6. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
7. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

9. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta berupa dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Pengurangan risiko bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
17. Tanggap darurat bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
18. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
22. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

23. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
25. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Peringatan dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
28. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan RPB Tahun 2026-2030 sebagai dokumen perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) RPB Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan RPB adalah:

- a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan Penanggulangan Bencana secara sistematis serta mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan Daerah.
- b. untuk menghasilkan dokumen rencana yang komprehensif mengenai risiko, kebutuhan, dan langkah Penanggulangan Bencana di Daerah;
- c. menyatukan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. meningkatkan kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi potensi bencana serta memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pasal 4

RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
- c. bab III penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bab IV tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- e. bab V rencana aksi daerah; dan
- f. bab VI pemanduan, pengendalian, dan evaluasi.
- g. bab VII penutup

Pasal 5

Evaluasi terhadap RPB dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan

daerah, badan penanggulangan daerah, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana paling sedikit satu tahun sekali dan ketika terjadi bencana atau kejadian luar biasa.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA KEDIRI 2026-2030

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan potensi bencana yang bervariasi akibat kondisi geografisnya. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri memiliki prioritas bencana yang akan ditangani selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Prioritas bencana tersebut adalah banjir dan tanah longsor dengan kelas risiko tinggi dan kejadian yang cenderung meningkat, serta cuaca ekstrem dengan kelas risiko sedang dengan kecenderungan kejadian meningkat.

Berdasarkan identifikasi masalah pokok yang dilakukan penilaian dengan memberikan bobot atau skor maka rumusan Isu strategis dalam rencana penanggulangan Bencana Kota Kediri Tahun 2026- 2030 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana
2. Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana
3. Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuan dari Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri adalah terwujudnya Ketangguhan Kota Kediri dalam penanggulangan Bencana melalui keselarasan pembangunan dan koordinasi lintas sektor. Tujuan dan sasaran dari Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri Tahun 2026-2030 diwujudkan melalui strategi berikut:

1. Memadukan penanganan dan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat

2. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga Pendidikan
3. Penguatan dan harmonisasi sistem regulasi tatakelola penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
4. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana untuk meningkatkan efektifitas pengendalian penataan ruang serta meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Masyarakat dan Pooling Fund Bencana. Penyaluran dana bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari penyaluran pada tahap pra-bencana, penyaluran pada tahap darurat bencana, penyaluran pada tahap pasca-bencana terutama kegiatan pemulihan dan penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari rencana pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan berupa program atau kegiatan terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah. RPB sebagai salah satu bagian dokumen perencanaan lainnya harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Dengan demikian RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Kediri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian

dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Seluruh wilayah Kota Kediri berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan terbelah oleh Sungai Brantas. Secara geografis Kota Kediri terletak pada 111°05' – 112°03' Bujur Timur dan 7°45' – 7°55' Lintang Selatan. Berdasarkan administrasi Kota Kediri terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Topografi wilayah Kota Kediri sebagian besar merupakan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0-2% seluas 5.373 ha atau sebesar 90,49%. Kondisi morfologi dan geologis Kota Kediri menyebabkan wilayah tersebut memiliki 5 potensi bencana yaitu banjir, cuaca ekstrem (puting beliung), kekeringan, gempa bumi, dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil KRB tahun 2023-2027 Kota Kediri memiliki potensi risiko bencana banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kekeringan, tanah longsor, covid-19. Berdasarkan data IRBI, Kota Kediri memiliki Indeks Risiko Bencana 80,74 yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kota Kediri, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan opsi arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Kediri yang dimulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok terpusat, hingga diskusi publik. Setiap perwakilan *stakeholder* terkait berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah disusun dan disepakati bersama setelah dokumen dilegalisasikan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kota Kediri.

Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Rencana Strategis ditujukan untuk mendukung tercapainya visi misi pembangunan. Perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya dapat menggunakan dokumen RPB sebagai acuan dalam menyusun Renstra OPD dan Renja OPD. Keberadaan RPB Kota Kediri diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana dan mengurangi kerugian yang berpotensi dialami daerah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Kediri melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada tahun 2024 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Dokumen RPB mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Dokumen Kajian Risiko Bencana serta penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang secara tidak langsung juga telah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2026-2030. Hasil dari Kajian Risiko bencana Kota Kediri tahun 2023 – 2027 menjadi landasan penyusunan

Dokumen RPB karena memberikan identifikasi risiko bencana serta permasalahan yang menyebabkan terjadinya risiko bencana tertentu di Kota Kediri. Adapun penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menunjukkan sejauh mana upaya daerah dalam pengurangan risiko bencana. Penyusunan Dokumen RPB didasarkan pada ketiga jenis dokumen tersebut agar memberikan opsi atau pilihan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen strategis yang berfungsi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui berbagai upaya baik pra-, saat maupun pasca bencana. Dokumen RPB selanjutnya diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar strategi pengurangan bencana daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh sektor pengurangan risiko bencana di daerah khususnya Kota Kediri.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Kediri dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Tujuan penyusunan RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah.

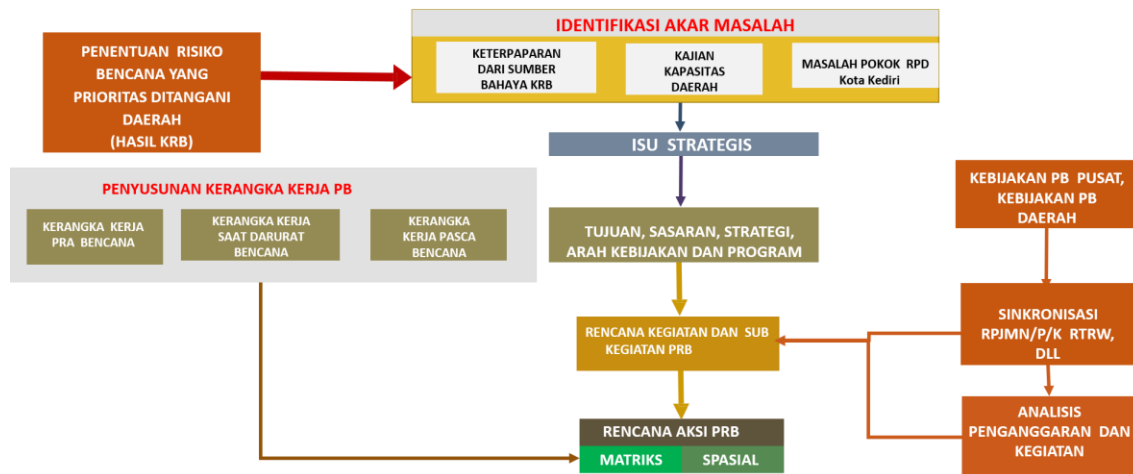
1.3 Kerangka Pikir

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri disusun secara komprehensif dengan mengacu pada dokumen pendukung yaitu dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Kediri Tahun 2023 – 2027 untuk menentukan risiko bencana prioritas yang ditangani oleh daerah, Indeks Ketahanan Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Identifikasi akar masalah yang berasal dari akar permasalahan Dokumen KRB, Kajian Kapasitas Daerah (IKD), masalah pokok dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026. Identifikasi akar masalah digunakan untuk menentukan isu strategis Kota Kediri. Isu strategis yang telah telah ditentukan merupakan acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, arah strategi dan program yang akan dilaksanakan dalam RPB Kota Kediri.

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana prioritas yang dapat terjadi di Kota Kediri. Penyusunannya kemudian dilengkapi dengan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang berupa rencana program kegiatan dan sub-kegiatan dalam pengurangan risiko bencana. Rencana kegiatan dan sub kegiatan pada penanggulangan risiko bencana dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan penanggulangan bencana pusat dan kebijakan penanggulangan daerah setempat, serta rencana pembangunan daerah. Sehingga kegiatan dan sub-kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan secara terpadu dan koordinatif. Selain itu, pada rencana kegiatan dan sub-kegiatan dilengkapi pula dengan analisis penganggaran dimana memudahkan dalam upaya pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan yang telah direncanakan di dalam Dokumen RPB.

Kegiatan dan sub-kegiatan pengurangan risiko bencana kemudian dituangkan dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana. Dalam bentuk matriks dan tersebar secara spasial. Rencana aksi pengurangan risiko bencana mengacu pada kerangka kerja penanggulangan bencana

yaitu kerangka kerja pra – bencana, saat darurat bencana dan pasca – bencana. Secara keseluruhan kerangka pikir penyusunan Dokumen RPB Kota Kediri disajikan dalam Gambar 1.1.



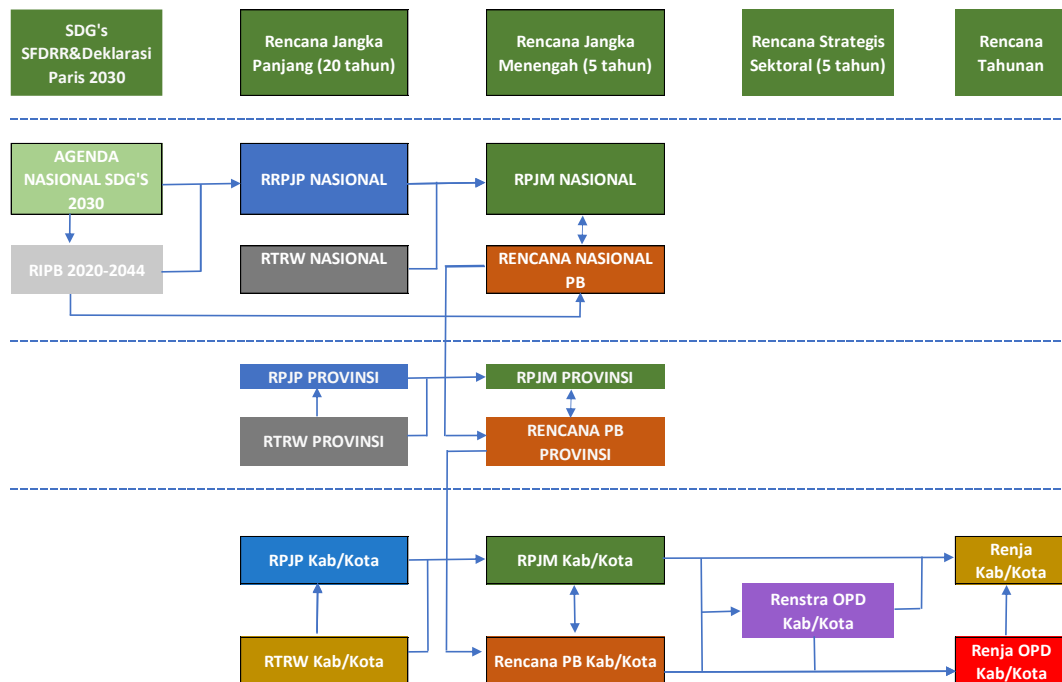
Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana

1.4 Kedudukan Dokumen

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari rencana pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan berupa program atau kegiatan terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Rencana Penanggulangan Bencana memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memberikan kerangka kerja dalam rangka mengurangi risiko bencana, memperkuat ketahanan wilayah, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. RPB dalam perencanaan daerah memastikan bahwa proyek pembangunan mempertimbangkan potensi risiko bencana. Posisi RPB dengan

perencanaan pembangunan daerah sebagai masukan isu strategis disajikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dengan perencanaan pembangunan daerah
Sumber: Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah. RPB sebagai salah satu bagian dokumen perencanaan lainnya harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Dengan demikian RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan

bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri dilegalkan menjadi Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri Tahun 2026-2030. Seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Kediri wajib berkomitmen untuk pelaksanaan program dalam Dokumen RPB. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan kerangka hukum pelaksanaan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, tindakan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Kediri berada pada Pemerintah Kota Kediri serta instansi dan lembaga terkait.

Rencana Penanggulangan Bencana juga merupakan bagian dari Perencanaan Penanggulangan Bencana. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 tahun 2018 bahwa jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana yang dimaksud memuat:

- a. Penyusunan kajian risiko bencana
- b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi:

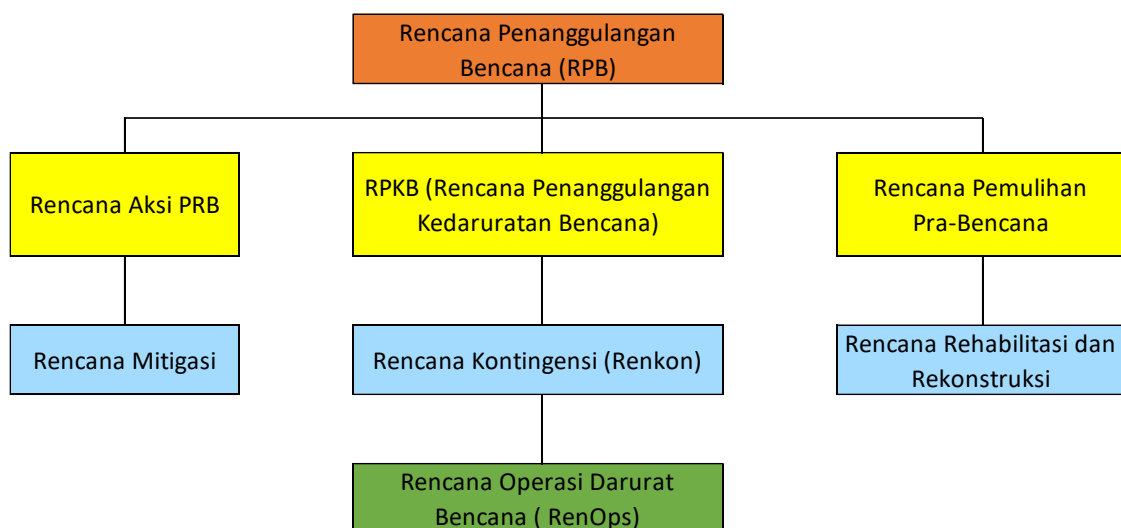
- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
- b. Pembuatan rencana kontijensi
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasaranan kesiapsiagaan terhadap bencana

- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- b. Respon cepat darurat bencana
- c. Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana



Gambar 1. 3 RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berperan penting dalam perencanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi bencana, menetapkan strategi penanggulangan dan memastikan kesiapan menghadapi bencana. Pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana agar kegiatan penanggulangan bencana selaras dan terpadu sesuai dengan Pasal 36

ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana mencakup kerangka kerja yang dijelaskan dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Pemulihan Pra Bencana (Pre Disaster Recovery Plan), Rencana Mitigasi, Rencana Kontingensi (Renkon), Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps).

1.5 Landasan Hukum

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Kota Kediri.

Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
11. Peraturan Presiden No 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana bersama Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Panduan Monitoring dan Evaluasi
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026
24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2027
25. Peraturan daerah kota kediri nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Daerah
27. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2023, Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027
28. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

1.6 Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri memuat kerangka aksi penanggulangan bencana tahun 2026-2030. Dokumen disusun berdasarkan hasil dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027 dan kondisi saat ini serta melalui proses diskusi kelompok terpumpun bersama para pihak terkait penanggulangan bencana di Kota Kediri. Hasil identifikasi isu strategis menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kota Kediri.

Lingkup risiko bencana mencakup bencana yang berpotensi terjadi di Kota Kediri. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023 - 2027 potensi bencana yang terjadi di Kota Kediri adalah bencana banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), kekeringan, tanah longsor, gempa bumi dan covid-19.

Lingkup jenis kegiatan rencana aksi mencakup seluruh kegiatan dalam tahapan penanggulangan bencana baik pra-, saat maupun pasca-bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang disesuaikan dengan kewenangan Kota Kediri. Adapun lingkup pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) merupakan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Kota Kediri, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, serta lembaga non-pemerintahan.

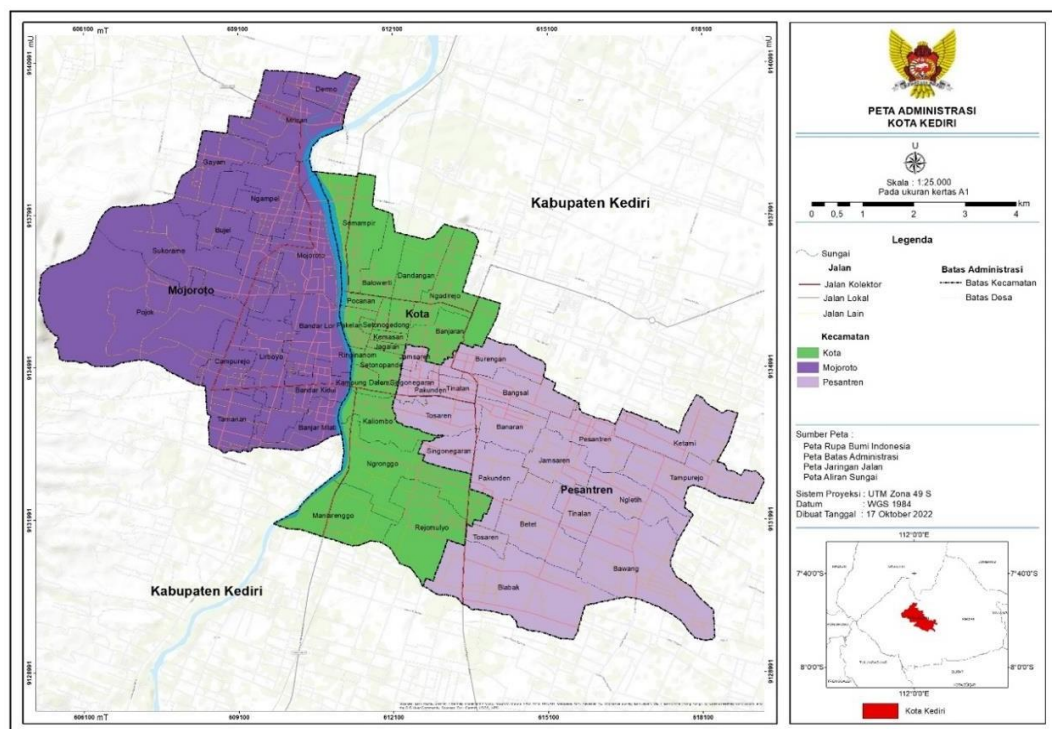
BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Wilayah dan Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.1.1 Geografis

Kota Kediri merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri. Secara astronomis Kota Kediri terletak pada koordinat antara 111,05° hingga 112,03° BT dan 7,45° hingga 7,55°LS. Kota Kediri terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu wilayah barat dan wilayah timur yang dipisahkan oleh aliran Sungai Brantas sepanjang 7 km. Wilayah timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren sedangkan wilayah barat meliputi wilayah Kecamatan Mojoroto.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Kediri

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Secara administratif Kota Kediri berbatasan langsung dengan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kediri, diantaranya:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih
- Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
- Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen

Kota Kediri dilalui oleh Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur. Sungai ini memisahkan Kota Kediri menjadi dua bagian yaitu wilayah barat dan timur. Sungai Brantas memiliki peran yang penting bagi masyarakat Kota Kediri sebagai irigasi pertanian. Keberadaan Sungai Brantas di Kota Kediri menyebabkan wilayah sekitar sungai rentan terhadap banjir, terutama jika terjadi hujan deras di bagian hulu yang menyebabkan aliran sungai meluap.

2.1.2 Geologis

Kota Kediri tersusun atas berbagai jenis material batuan dan tanah. Berdasarkan Peta Geologi pada Gambar 2.2, material penyusunnya meliputi batuan sedimen, batuan vulkanik, dan aluvium yang umurnya diperkirakan dari Pleistosen Awal hingga *Recent*. Beberapa wilayah Kecamatan Mojoroto seperti Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Bujer, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Pojok, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Tamanan terdapat kerikil, pasir lempung, dan endapan aluvial, lumpur dan sisa-sisa tanaman. Bahannya berwarna abu-abu kuning keruh hingga kehitaman dan mudah lepas atau gempur.

Jenis batuan yang terdapat di Kecamatan Kota merupakan tufa vulkanik intermediet dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan tanah bertekstur halus. Pada wilayah Kecamatan Pesantren batuan penyusunnya meliputi endapan lava. Batuan tersebut sebagian besar berasal dari Gunung Kelud dan ada pula yang berasal dari Gunung Anjasmoro dan Gunung Kawi Butak. Endapan lava ini terdapat di kaki gunung, lereng gunung, dan di lembah sungai yang diperkirakan berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsor. Ketebalan batuan jenis ini berkisar antara puluhan meter hingga ratusan meter. Kedalaman tanah efektif lebih dari 25 cm dan tanah berbutir halus. Material yang menyusun menunjukkan bahwa daerah ini dulunya terdampak letusan gunungapi berupa lahar. Endapan aluvial menunjukkan proses sungai mendominasi wilayah ini. Proses sungai yang ini ditunjukkan pula dengan adanya aliran Sungai Brantas yang membelah Kota Kediri yang menyebabkan banjir jika debit alirannya meluap.

2.1.3 Topografi

Topografi wilayah Kota Kediri memiliki kemiringan antara 0-40% dan sebagian besar merupakan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0-2% seluas 5.373 ha atau sebesar 90,49%. Gambar 2.3 menunjukkan Peta Topografi Kota Kediri. Sebagian besar wilayah di Kota Kediri berada pada ketinggian 63 meter sampai 100 meter di atas permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan sisi kanan Sungai Brantas. Wilayah ini memiliki potensi bencana banjir dan cuaca ekstrem dikarenakan topografinya yang cenderung datar.

Wilayah yang memiliki ketinggian antara 15-40% berada di Kawasan Gunung Maskumambang yang memiliki ketinggian sebesar 300 meter di atas permukaan laut serta Gunung Klotok yang memiliki ketinggian sebesar 672 meter di atas permukaan laut di bagian barat Kecamatan Mojoagung. Ketinggian antara 15%-40% berada di bagian barat Kecamatan Mojoagung yang bertepatan dengan

perbatasan Gunung Klotok yang memiliki ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang yang memiliki ketinggian 300 meter. Wilayah dengan ketinggian tersebut berpotensi memiliki bencana tanah longsor.

2.1.4 Hidrologi

Kota Kediri memiliki Sungai Brantas yang mengalir di tengah kota dari arah selatan menuju arah utara. Sungai Brantas memisahkan antara wilayah Kota Kediri bagian barat dengan wilayah Kediri bagian timur. Sungai Brantas dialiri oleh beberapa sungai diantaranya Sungai Kresek, Sungai Parang, Sungai Kedak, Sungai Ngampel, Sungai Bruno, dan Sungai Tawang.

Kota Kediri memiliki 21 mata air yang terdapat di Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Kecamatan Mojoroto memiliki 7 sumber mata air yang memiliki debit paling besar adalah sedang (0-60 liter/detik) dan Kecamatan Pesantren memiliki 14 sumber mata air yang memiliki debit paling besar (10-112 liter/detik). Kondisi hidrologi Kota Kediri tersebut menyebabkan Kota Kediri memiliki potensi bencana banjir. Hal ini diperkuat dengan catatan kejadian bencana banjir sering terjadi di Kota Kediri akibat meluapnya aliran sungai.

2.1.5 Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bahaya terhadap suatu bencana. Kondisi penduduk akan menentukan jumlah jiwa terpapar bencana yang termasuk ke dalam dampak langsung dari suatu bencana. Dampak bencana terhadap penduduk meliputi korban jiwa, korban hilang, luka-luka hingga mengungsi. Penduduk terpapar terbagi atas jumlah seluruh penduduk yang tinggal di daerah berpotensi bencana dan penduduk rentan (penduduk umur rentan, disabilitas, dan penduduk miskin).

Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2023 berjumlah 298.820 jiwa dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mojoroto yaitu 116.070 jiwa. Jumlah penduduk paling

sedikit pada tahun 2023 berada pada Kecamatan Kota dengan jumlah penduduk 90.510 jiwa. Kondisi demografi Kota Kediri pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kondisi Demografi Kota Kediri

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mojoaroto	118.560	114.553	115.018	115.346	116.070
2	Kota	85.024	84.291	84.634	84.446	90.510
3	Pesantren	83.825	88.310	88.310	89.626	92.240
Total		287.409	286.796	287.962	289.418	298.820

Sumber: BPS Buku dalam Angka Kota Kediri



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 2.1 dan grafik diatas, Kota Kediri cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk memiliki dampak pada kerentanan bencana. Jumlah penduduk mempengaruhi besarnya potensi kerusakan akibat bencana, karena semakin banyak orang yang terpapar langsung dengan risiko yang ada. Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan perkotaan dapat memperburuk dampak bencana misal,gempabumi, banjir, atau

kebakaran. Selain itu kepadatan penduduk seringkali diikuti dengan konservasi lahan yang tidak sesuai.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di Kota Kediri berupa lahan terbangun, akan tetapi perkembangan lahan terbangun tersebut belum merata. Gambar 2.4 menunjukkan kepadatan penggunaan lahan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota, dimana 63% dari penggunaan lahan di Kecamatan Kota digunakan sebagai perkantoran, jasa, industri, perumahan, pariwisata perkotaan, dan 37% digunakan untuk persawahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lahan kosong. Penggunaan lahan di Kecamatan Mojoroto 67,48% digunakan untuk persawahan, lahan kosong, dan hutan sedangkan 32,52% digunakan sebagai kawasan pendidikan, industri perumahan, industri pariwisata, pertanian dan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah. Penggunaan lahan di Kecamatan Pesantren hampir sama dengan penggunaan lahan di Kecamatan Mojoroto yaitu sebesar 58,81% digunakan sebagai persawahan, dan 41,19% digunakan sebagai perkantoran, industri, industri rumah tangga, kawasan permukiman dengan kepadatan menengah dan rendah, serta pertanian. Gambar 2.4 menunjukkan penggunaan lahan di Kota Kediri.

Kondisi penggunaan lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun, mencerminkan perkembangan pesat kota sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pendidikan di wilayah Jawa Timur. Permukiman, kawasan komersial, serta infrastruktur perkotaan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, dominasi lahan terbangun ini juga membawa konsekuensi terhadap aspek kebencanaan, terutama terkait dengan risiko banjir dan penurunan daya dukung lingkungan. Tingginya proporsi lahan terbangun mengurangi daerah resapan air, sehingga meningkatkan potensi banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan kapasitas drainase perkotaan

tidak mampu menampung debit air yang besar. Beberapa wilayah di Kota Kediri yang berada di sekitar Sungai Brantas memiliki risiko lebih tinggi terhadap banjir akibat luapan sungai. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang masif dapat meningkatkan suhu permukaan kota (*urban heat island*), mengurangi kualitas udara, dan mempercepat degradasi lingkungan serta dapat meningkatkan terjadinya angin puting beliung yang merupakan bencana cuaca ekstrem.

2.1.7 Karakteristik Kebencanaan Daerah

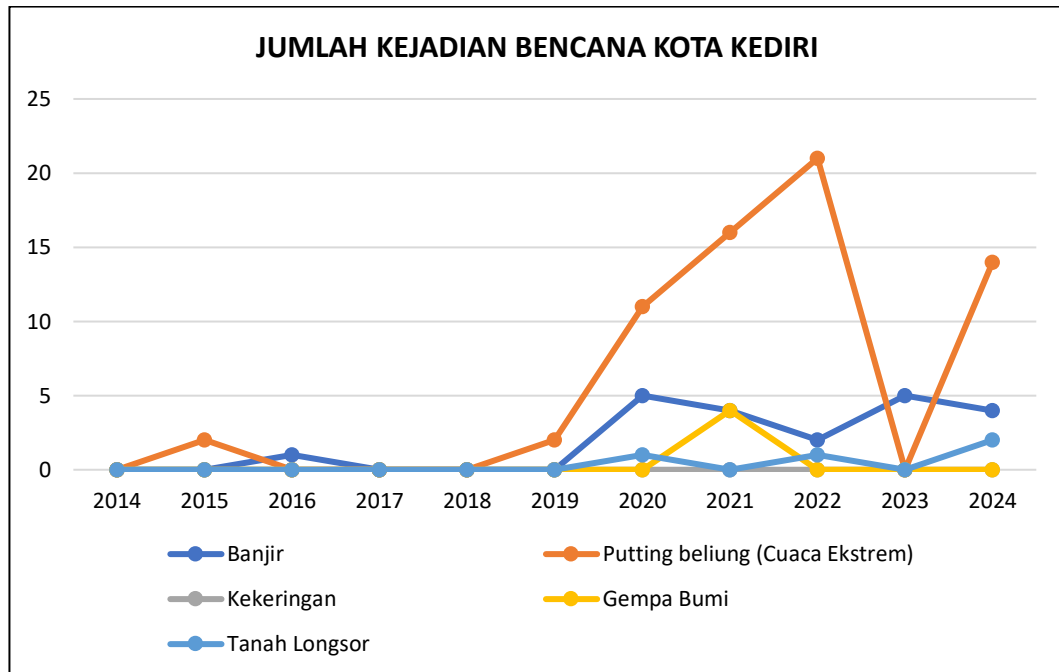
Mengumpulkan dan mendokumentasikan sejarah bencana di masa lalu merupakan prasyarat untuk menyusun strategi ke depan. Berbekal catatan masa lalu, kemudian kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail bagaimana langkah selanjutnya dalam rangka menyusun kesiapsiagaan masyarakat, pendekatan apa yang perlu dilakukan di tingkat lokal dan bagaimana menyiapkan masyarakat sampai pada struktur kecil, di tingkat keluarga. Interaksi antara aktivitas alam dan masyarakat, menimbulkan persepsi berbeda salah satunya adalah bencana. Berdasarkan data DIBI-BNPB tahun 2022, data BPS tahun 2018-2022, dan data BPBD tahun 2014-2024, terdapat lima jenis bencana alam yang terjadi di Kota Kediri pada periode tahun 2011 hingga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Kediri

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian (2014-2024)
1	Banjir	21
2	Puting beliung (cuaca ekstrem)	66
3	Kekeringan	0
4	Gempa bumi	4
5	Tanah Longsor	4

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Berdasarkan Tabel 2.2 tercatat kejadian bencana angin puting beliung dalam kurun waktu 2019-2022 terdapat 52 kejadian. Hal ini terjadi karena letak Kota Kediri yang berada dataran rendah dan diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Wilis dan Gunungapi Kelud.



Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Kota Kediri
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Berdasarkan data dari Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2037 bencana yang sering terjadi di Kota Kediri selain angin puting beliung adalah banjir. Bencana banjir yang sering terjadi karena meluapnya aliran Sungai Brantas dan masalah pada saluran drainase. Sedangkan bencana yang jarang atau tidak terjadi di Kota Kediri dari tahun 2014-2024 adalah bencana kekeringan.

2.2 Risiko Bencana Daerah

2.2.1 Potensi Wilayah Terpapar

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Kota

Kediri Tahun 2023 - 2027, diperoleh rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kota Kediri. Hasil rekapitulasi bahaya memberikan gambaran luas dan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya. Karakteristik tingkat bahaya Kota Kediri disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Tingkat Bahaya Kota Kediri

No	Bencana	Potensi Luas Bahaya (Ha)				Kelas Bahaya
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	192,19	492,29	2.310,26	2.994,74	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	-	348,12	6.371,83	6.719,95	Tinggi
3	Gempa Bumi	377,75	1.099,04	5.243,15	6.719,95	Tinggi
4	Kekeringan	-	6.719,95	-	6.719,95	Sedang
5	Tanah Longsor	150,21	-	203,31	353,52	Tinggi
6	Covid-19	3.010,03	3.283,69	426,22	6.719,95	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Tabel 2.3 menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya di Kota Kediri. Terdapat 5 (enam) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi seluruhnya. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi tersebut yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, tanah longsor dan tanah longsor. Terdapat jenis ancaman bencana dengan kelas sedang yaitu kekeringan.

Bencana banjir memiliki kelas bahaya tinggi dengan luas bahaya total sebesar 2.994,74 ha. Bencana cuaca ekstrem, gempa bumi dan covid-19 memiliki kelas bahaya tinggi dengan luas bahaya total yang sama yaitu sebesar 6.719,95 ha. Bencana kekeringan memiliki kelas bahaya sedang dengan luas bahaya sebesar 6.719,95 ha. Bencana tanah longsor memiliki kelas bahaya tinggi dengan luas bahaya sebesar 353,52 ha.

2.2.2 Potensi Penduduk Terpapar

Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya potensi bahaya di Kota Kediri. Potensi penduduk terpapar merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terdampak pada satu kejadian bencana di Kota Kediri. Dari sejumlah penduduk terpapar terdiri dari kelompok rentan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, pengelompokan penduduk rentan diklasifikasikan berdasarkan, kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin. Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar berdasarkan jenis bahaya disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Kota Kediri

Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)						
No	Jenis Bahaya	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan			Kelas Kerentanan
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	168.279	31.996	28.619	1.173	Sedang
2	Cuaca ekstrem	293.287	54.193	51.912	1.993	Sedang
3	Gempa bumi	293.288	54.193	51.912	1.993	Sedang
4	Kekeringan	293.287	54.193	51.912	1.993	Sedang
5	Tanah longsor	1.448	254	243	7	Rendah
6	Covid-19	293.268	54.193	51.912	1.993	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Potensi penduduk terpapar bencana Kota Kediri terbagi menjadi 2 kelas kerentanan yaitu kelas sedang dan kelas rendah. Bencana yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kekeringan dan covid-19. Bencana dengan jumlah potensi penduduk terpapar kelas kerentanan rendah yaitu tanah longsor.

2.2.3 Potensi Kerugian Bencana

Potensi Kerugian Bencana merujuk pada dampak negatif yang mungkin terjadi akibat suatu bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi kerugian bencana melibatkan berbagai aspek diantaranya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian bencana Kota Kediri disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi di Kota Kediri

Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)					Kelas Kerugian
	Kerugian Fisik	Kelas Kerentanan Fisik	Kerugian Ekonomi	Kelas Kerentanan Ekonomi	Total Kerugian	
Banjir	2.293.541,50	Sedang	55.703,60	Tinggi	2.348.572,50	Sedang
Cuaca Ekstrem	4.954.701,75	Sedang	186.293,00	Tinggi	5.140.994,75	Sedang
Gempa Bumi	2.725.382,19	Sedang	86.027,67	Tinggi	2.810.409,86	Sedang
Kekeringan	-	-	95.375,78	Sedang	95.375,78	Sedang
Tanah Longsor	3.167,22	Rendah	12.061,99	Tinggi	15.229,21	Sedang
Covid-19	-	-	-	-	-	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Kerentanan fisik akibat bencana terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas sedang dan kelas rendah sedangkan kelas kerentanan ekonomi terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas tinggi dan sedang. Bencana banjir, cuaca ekstrem dan gempa bumi memiliki kelas kerentanan fisik sedang dan kelas kerentanan ekonomi yang tinggi. Bencana kekeringan tidak memiliki kerentanan fisik secara langsung dan memiliki kelas kerentanan ekonomi sedang. Bencana tanah longsor memiliki kelas kerentanan fisik yang rendah dan

memiliki kelas kerentanan ekonomi yang tinggi. Bencana banjir. Bencana banjir memiliki potensi total kerugian sebesar .348.572,50 rupiah. Cuaca ekstrem memiliki potensi total kerugian sebesar 5.140.994,75 rupiah. Bencana gempabumi memiliki potensi total kerugian sebesar 2.810.409,86 juta rupiah. Kekeringan memiliki potensi total kerugian sebesar 95.375, 78 rupiah dan bencana tanah longsor memiliki potensi total kerugian sebesar 15.229, 21 rupiah.

2.2.4 Potensi Kerusakan Lingkungan

Selain kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, bencana juga dapat menyebabkan adanya potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan mengakibatkan kerentanan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kota Kediri disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan

No	Bencana	Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerentanan Lingkungan
1	Banjir	68	Rendah
2	Cuaca Ektrem	-	-
3	Gempa Bumi	-	-
4	Kekeringan	402	Rendah
5	Tanah Longsor	300	Tinggi
6	Covid-19	-	-

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Kelas kerentanan lingkungan terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terjadi pada bencana banjir dan kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan akibat banjir seluas 68 ha. Potensi kerusakan lingkungan akibat kekeringan seluas 402 ha. Kelas kerentanan tinggi pada bencana tanah longsor.

2.2.5 Risiko Bencana

A. Risiko Bencana Kota Kediri

Kota Kediri telah melakukan pengkajian risiko bencana. Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027 mengkaji 6 potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Potensi bencana di Kota Kediri dalam Kajian Risiko Bencana meliputi:

1. Banjir
2. Cuaca Ekstrem
3. Gempa bumi
4. Kekeringan
5. Tanah Longsor
6. Covid-19

Kajian potensi bencana dilakukan berdasarkan kejadian yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa depan. Bencana yang telah terjadi dianalisis berdasarkan sejarah kejadian bencana Kota Kediri. Sementara itu, potensi bencana yang belum terjadi dikaji dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta faktor bahaya yang digunakan dalam metodologi pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB.

Penilaian risiko bencana dilakukan dengan menganalisis tingkat ancaman atau bahaya, tingkat kerentanan, serta kapasitas suatu wilayah. Sehingga menghasilkan potensi luas bahaya (wilayah terpapar), potensi penduduk terpapar, potensi kerusakan dan kerugian ekonomi fisik maupun lingkungan. Selain itu di dalam analisis risiko bencana juga dilakukan penilaian kapasitas baik itu kapasitas masyarakat dan kapasitas daerah yang direpresentasikan melalui penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Risiko bencana daerah dipengaruhi oleh faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Tingkat risiko bencana daerah yang ada di Kota Kediri disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Tingkat Risiko Bencana Kota Kediri

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Cuaca ekstrem	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
4	Tanah longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Gempa bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
6	Covid-19	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Berdasarkan Tabel 2.7 Bencana banjir, tanah longsor, dan covid-19 di Kota Kediri memiliki kelas risiko tinggi dan bencana cuaca ekstrem, kekeringan, gempa bumi memiliki kelas risiko sedang.

B. Indek Risiko Bencana Kota Kediri

Indeks Risiko Bencana (IRB) berfungsi untuk mengukur tingkat kerentanan suatu daerah terhadap bencana. Daerah dengan nilai IRB tinggi cenderung lebih rentan terhadap bencana dan akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam menghadapi bencana. Hubungan nilai IKD dan IRB menunjukkan bahwa daerah dengan ketahanan tinggi cenderung memiliki risiko bencana yang rendah.

Berdasarkan nilai IKD Kota Kediri selama lima tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan, maka selaras dengan nilai IRB Kota Kediri selama lima tahun yang cenderung mengalami penurunan. Penilaian terhadap Indeks Risiko Bencana dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) setiap tahunnya. Penilaian IRB dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kerja yang berfokus pada pengurangan risiko

bencana di Kota Kediri. Tabel 2.8 menunjukkan nilai IRB Kota Kediri selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 8 Nilai IRB Kota Kediri Tahun 2019-2023

2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
122,79	109,69	100,84	89,88	80,74	SEDANG

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2023

Berdasarkan Tabel 2.8 menunjukkan nilai IRB Kota Kediri dari Tahun 2019-2023. Di dalam Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki mengalami penurunan nilai IRB. Terakhir di Tahun 2023 nilai IRB adalah 80,74 yang termasuk ke dalam kelas sedang. Semakin rendah nilai IRB maka semakin menurun pula risiko bencana yang mungkin terjadi. Adapun indeks risiko bencana untuk setiap bencana di Kota Kediri disajikan dalam Tabel 2.9. Indeks risiko bencana tersebut dilakukan penilaian pada tahun 2023.

Tabel 2. 9 Nilai IRB Setiap Bencana Kota Kediri Tahun 2023

No.	Jenis Bahaya	SKOR	Kelas Risiko
1	Banjir	14,7	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	5,74	Sedang
3	Gempa Bumi	9,11	Sedang
4	Kekeringan	10,12	Sedang
5	Tanah Longsor	5,06	Rendah

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2023

C. Indeks Ketahanan Daerah Kota Kediri

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu wilayah dalam menanggapi, mengelola, dan memulihkan diri pasca bencana atau risiko lain yang mengancam. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah daerah siap menghadapi tantangan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Indeks Ketahanan Daerah juga berperan dalam perencanaan kebijakan yang berfokus pada pengurangan risiko bencana.

Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Kediri telah menunjukkan dinamika yang menarik dalam indeks ketahanan kota karena nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri mengalami kenaikan. Indeks ini mencerminkan kemampuan kota untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan baik dari segi bencana alam, tekanan ekonomi, maupun perubahan sosial. Tabel 2.10 menunjukkan nilai IKD Kota Kediri selama lima tahun terakhir dari Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 10 Nilai IKD Kota Kediri Tahun 2019-2023

2019	2020	2021	2022	2023
0,51	0,52	0,65	0,76	0,77

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa Kota Kediri mengalami kenaikan nilai IKD dari tahun 2019-2023. Terakhir di Tahun 2023 nilai IKD adalah 0,77 yang termasuk ke dalam kelas sedang. Semakin tinggi nilai IKD maka kapasitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut semakin tinggi.

Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Kediri tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Kediri tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai indeks 5 (lima) tahun sebelumnya. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Kediri tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Indeks Kapasitas Daerah Kota Kediri

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,64		
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,70		

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,65	0,50	Sedang
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,73		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,59		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,35		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

Sumber: Indeks Ketahanan Daerah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.11 nilai IKD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah 0,50 dengan tingkat **sedang**. Terdapat 2 prioritas yang memiliki nilai indeks rendah yaitu prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana dengan nilai indeks 0,35. Selain itu, terdapat nilai indeks 0,59 pada prioritas 5 yaitu peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.

Meningkatkan indeks ketahanan daerah merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Terdapat kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks prioritas yang masih tergolong rendah diantaranya:

- Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks prioritas 6:
 1. Pelatihan dan simulasi bencana
 2. Peningkatan infrastruktur kesiapsiagaan
 3. Penyuluhan kepada masyarakat
 4. Pengembangan sistem peringatan dini

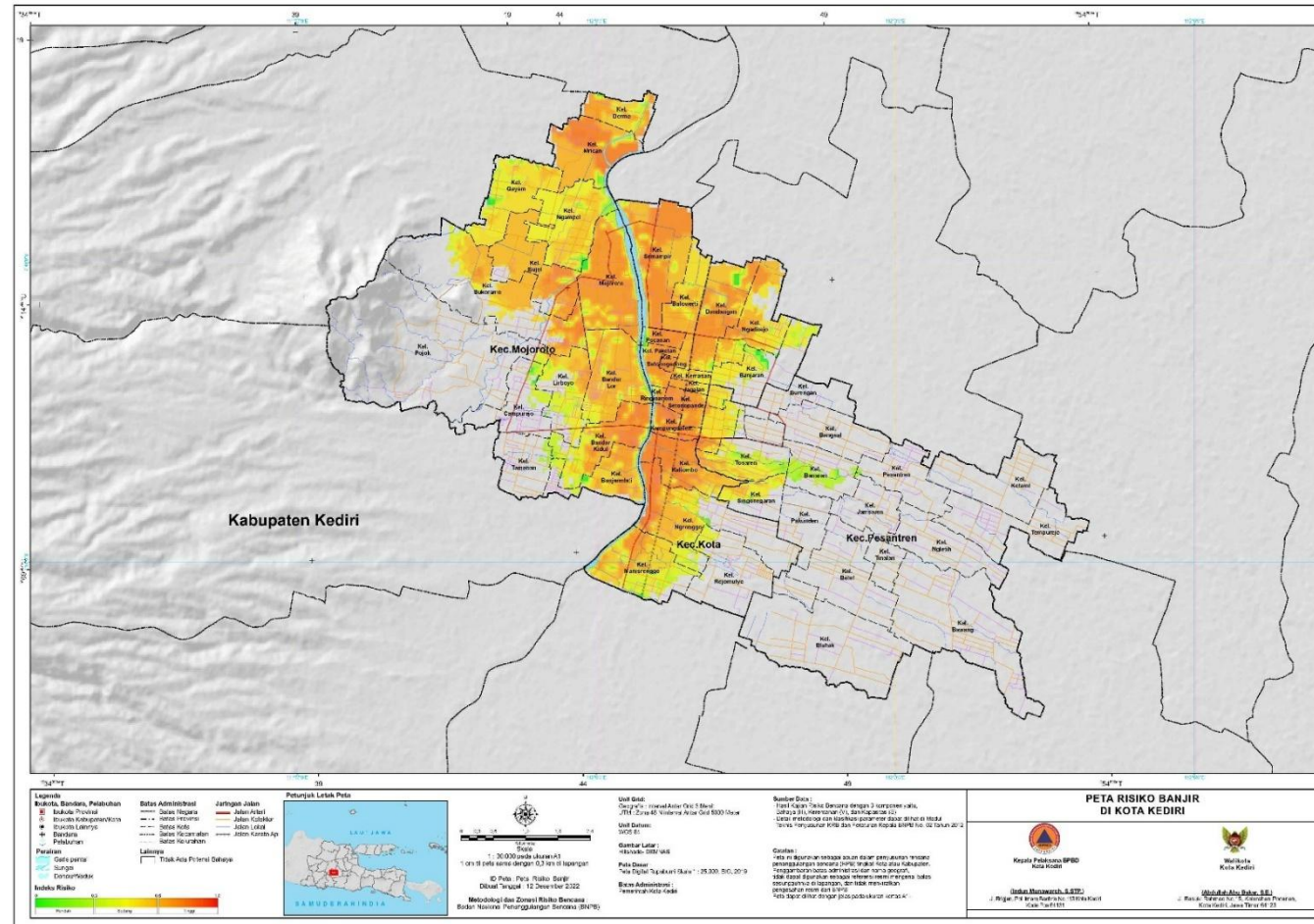
- Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks prioritas 7:

1. Penyusunan rencana pemulihan bencana yang komprehensif
2. Pengembangan infrastruktur pemulihan
3. Penyediaan bantuan sosial, ekonomi, serta pemulihan lingkungan.

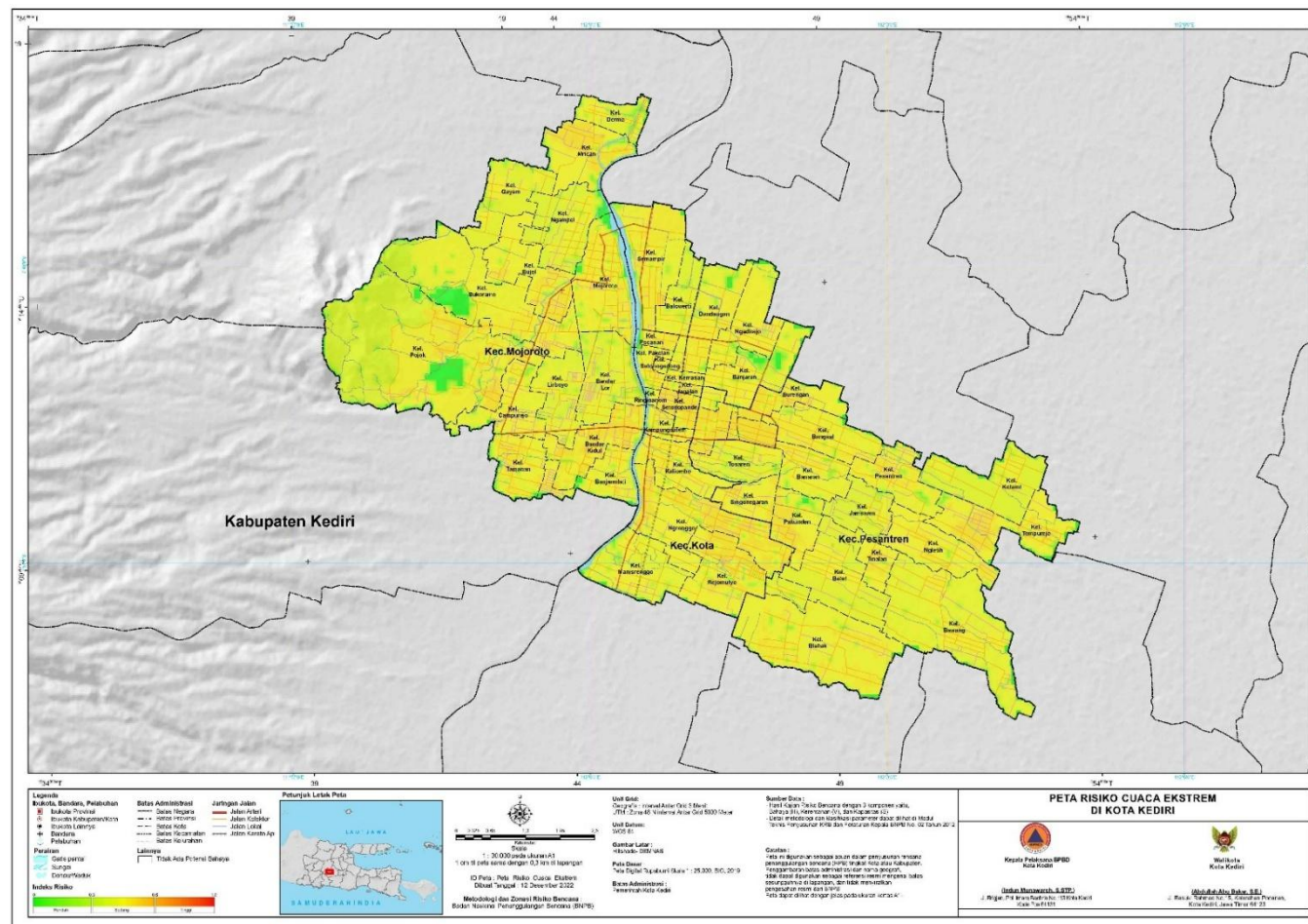
Meningkatkan nilai indeks prioritas pada peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks pada prioritas tersebut adalah:

1. Penyusunan dan sosialisasi peta risiko bencana
2. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana
3. Pelatihan dan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana

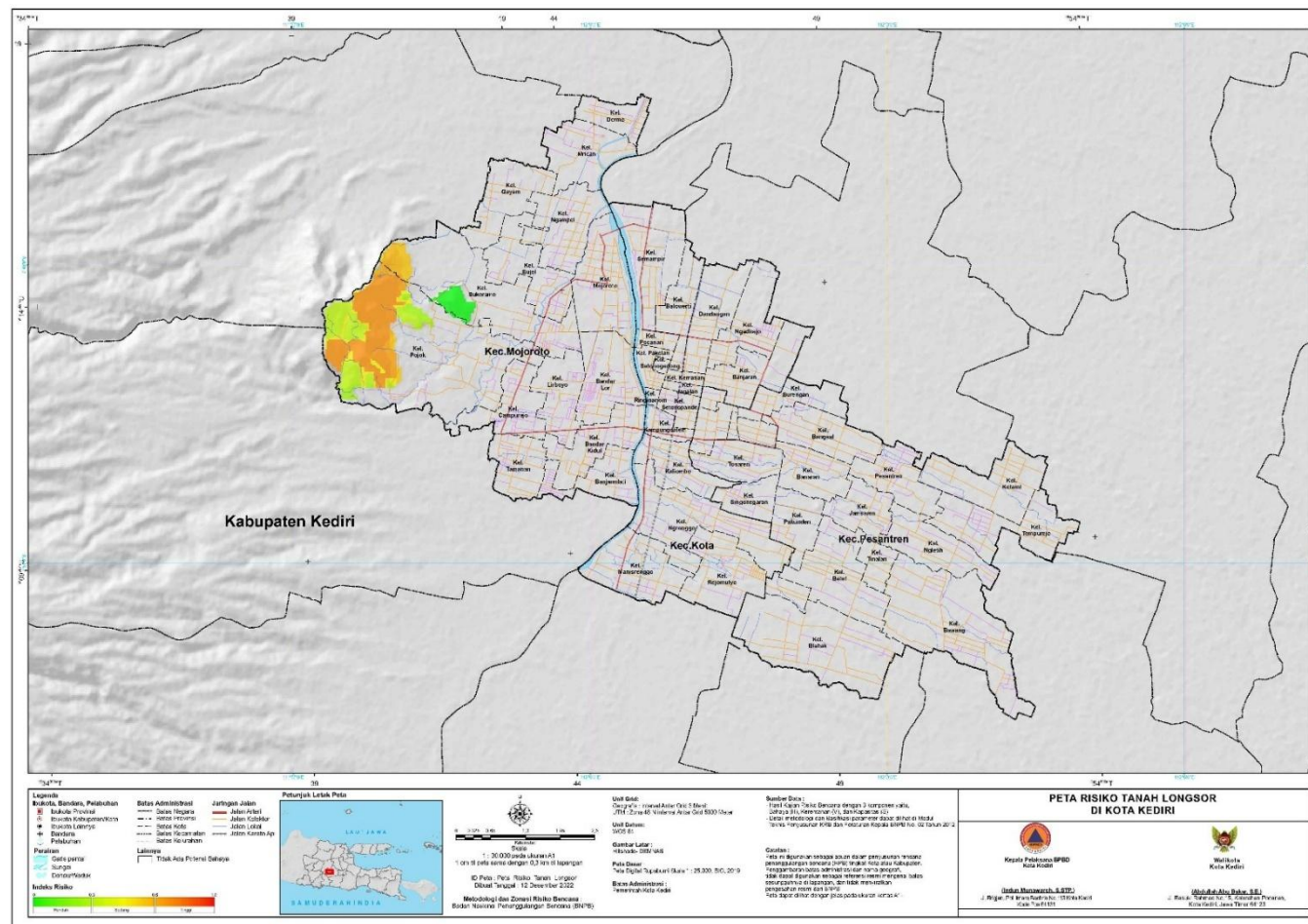
2.2.6 Peta Risiko Bencana



Gambar 2. 4 Peta Risiko Banjir Kota Kediri
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027



Gambar 2. 5 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Kediri
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027



Gambar 2. 6 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

2.3 Prioritas Bencana yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang akan ditangani dalam rencana penanggulangan bencana ditentukan berdasarkan kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana di wilayah Kota Kediri. Bencana yang diprioritaskan adalah bencana yang dengan tingkat risiko tinggi atau sedang dengan tingkat kecenderungan kejadian yang meningkat. Penentuan prioritas bencana yang ditangani di Kota Kediri disajikan dalam matriks pada Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Matriks Prioritas Bencana Kota Kediri

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat		Cuaca Ekstrem	Banjir, Tanah Longsor, Covid-19
	Tetap		Kekeringan, Gempabumi	
	Menurun			

Sumber: Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2023, Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027

Keterangan:

	Bencana Prioritas
	Bencana Non- Prioritas
	Bencana Non- Prioritas

Berdasarkan matriks pada Tabel 2.12 bencana yang menjadi prioritas dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri tahun 2026-2030 adalah bencana cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor dan covid-19. Cuaca ekstrem memiliki kecenderungan kejadian meningkat dengan risiko sedang. Bencana non-prioritas Kota Kediri yaitu kekeringan dan gempabumi.

2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok yang terdapat dalam RPB Kota Kediri diperoleh dari rekomendasi hasil Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri 2025-2029, dan Indeks Ketahanan Daerah. Masing-masing masalah pokok akan dipaparkan dan diberi skor untuk memperoleh rumusan isu strategis. Berikut merupakan uraian masalah pokok dalam rencana penanggulangan bencana ini:

2.4.1 Keterpaparan dan Kerentanan Bencana

Karakteristik Kota Kediri dilalui oleh Sungai Brantas sepanjang 7 km yang membagi wilayah Kota Kediri menjadi 2 yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat merupakan wilayah Kecamatan Mojoroto sedangkan wilayah timur meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Topografi Kota Kediri yang berupa dataran rendah menjadikan Kota Kediri memiliki ancaman bencana utama seperti banjir dan cuaca ekstrem. Selain itu, terdapat beberapa bencana lain yang terdapat pada catatan kejadian bencana Kota Kediri seperti kekeringan, tanah longsor, dan gempa bumi. Berikut merupakan masalah dari keterpaparan risiko bencana prioritas yang ada di Kota Kediri.

1. Banyaknya bangunan yang terdampak bencana Cuaca Ekstrem (Puting Beliung) karena tidak menggunakan konstruksi yang tahan bencana

Letak Kota Kediri berada di tengah Gunung Wilis dan Gunung Kelud membuat Kota Kediri menjadi lorong angin dari utara ke selatan. Kondisi tersebut juga mengakibatkan perubahan tekanan udara yang signifikan antara bagian atas dan bawah kota dapat berlangsung dengan cepat dan berpotensi terjadi angin puting beliung. Pemicu lain terjadi angin puting beliung adalah perbedaan keterbukaan lahan yang signifikan sehingga menyebabkan

perubahan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca di area permukiman dan pertanian.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kondisi cuaca ekstrem terlihat pada bangunan yang dibuat oleh masyarakat yang kurang memperhatikan kemampuan bangunan dalam menahan hembusan angin. Sebagian besar area terbangun masih menggunakan atap dari seng khususnya pada bangunan industri, perdagangan dan jasa. Dibeberapa wilayah masih terdapat keterbatasan akses air bersih

2. Di beberapa wilayah masih terdapat keterbatasan akses air bersih

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Kediri meningkatkan kebutuhan akan air bersih, namun ketersediaannya yang terbatas menyebabkan terjadinya defisit air. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kebijakan dan infrastruktur penyediaan air bersih, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, di beberapa wilayah, air bersih juga dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian, yang mendorong pemanfaatan air secara berlebihan. Akibatnya, terjadi penurunan kedalaman air tanah dangkal serta berpotensi memicu perubahan iklim, semakin memperburuk krisis air di Kota Kediri.

3. Perencanaan drainase yang kurang memadai sehingga menyebabkan banjir

Sebagian besar wilayah di Kota Kediri memiliki topografi Kota Kediri yang relatif datar terutama pada wilayah yang dilalui oleh aliran Sungai Brantas. Selain memiliki topografi datar, Kota Kediri terletak pada cekungan antara Gunung Willis dan Gunung Kelud, terletak pada dataran vulkanik fluvial sehingga mengakibatkan terjadinya limpasan air terutama pada saat hujan lebat dan berpotensi memunculkan genangan.

Berdasarkan hasil Kajian Pengendalian Banjir Kota Kediri Tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri permasalahan ketersediaan drainase yang kurang memadai menimbulkan munculnya beberapa titik genangan. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai maupun saluran drainase turut meningkatkan potensi terjadinya genangan banjir. Selain itu, penyediaan ruang pengatusan air melalui penataan ruang terbuka hijau di Kota Kediri belum memenuhi target minimal 20% dari luas wilayahnya, khususnya penyediaan ruang terbuka hijau di tepi jalan serta pemenuhan ruang terbuka hijau yang berada di sempadan sungai.

4. Kondisi tanah yang jenuh air dan pembangunan ekspansif di daerah berlereng meningkatkan risiko tanah longsor di Kota Kediri

Risiko bencana tanah longsor di Kota Kediri terdapat di sekitar wilayah Gunung Klotok, tepatnya di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame. Kondisi tanah yang jenuh air menyebabkan Kota Kediri berpotensi mengalami bencana tanah longsor karena tanah tidak mampu menahan beban bangunan yang ada di atasnya. Tumbangnya pohon diakibatkan cuaca ekstrem (angin puting beliung) yang terjadi di wilayah Kota Kediri menyebabkan tanah menjadi jenuh air, sehingga menyebabkan tanah longsor di berbagai lokasi Kota Kediri. Meskipun frekuensi terjadinya tanah longsor relatif rendah, tetapi bahaya bencana tanah longsor perlu diperhatikan, terutama pada beberapa bangunan karena meningkatnya kebutuhan lahan mendorong pembangunan ekspansif hingga ke daerah yang berlereng.

5. Pesatnya perubahan penggunaan lahan tanpa memperhatikan aspek tata ruang dan mitigasi bencana

Pesatnya perubahan penggunaan lahan di Kota Kediri tanpa memperhatikan aspek tata ruang dan mitigasi bencana semakin

meningkatkan risiko banjir di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan yang awalnya berupa area resapan air, seperti lahan pertanian dan ruang terbuka hijau, menjadi permukiman padat serta kawasan komersial menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali sering kali mengabaikan sistem drainase yang memadai, sehingga memperparah genangan saat terjadi curah hujan tinggi. Ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan daya dukung lingkungan ini juga diperburuk oleh minimnya koordinasi dalam perencanaan tata ruang lintas wilayah, di mana pengelolaan air hujan dan limbah domestik tidak tertangani secara optimal.

6. Wilayah berisiko berada pada kawasan lintas kewenangan sehingga memerlukan adanya keterlibatan multipihak

Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Kediri berada di kawasan yang berbatasan dengan daerah lain, sehingga kewenangan dalam penanganannya sering kali tidak jelas. Salah satu faktor utama penyebab banjir di Kota Kediri adalah Sungai Brantas, yang mengalir melintasi beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan wilayah lainnya. Ketidakseimbangan kapasitas drainase serta alih fungsi lahan di berbagai daerah sepanjang aliran sungai ini turut meningkatkan risiko banjir di Kota Kediri.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas serta instansi terkait lainnya menyebabkan upaya mitigasi bencana sering kali tidak optimal, terutama dalam hal pengelolaan aliran air, sistem drainase maupun yang terkait mitigasi bencana. Perbedaan kebijakan dan kewenangan antar wilayah juga menjadi tantangan dalam mengatasi permasalahan banjir yang bersifat lintas daerah dan lintas wewenang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga serta keterlibatan multipihak, termasuk masyarakat, akademisi,

dan dunia usaha, dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pengurangan risiko bencana.

7. Minimnya hasil riset, penelitian, pengembangan yang diterapkan dan dimanfaatkan

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan yang berbasis data. Oleh karena itu, perlu adanya arahan yang lebih sistematis dalam penyediaan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan. Meskipun berbagai riset, penelitian, dan pengembangan telah dilakukan, tingkat penerapan dan pemanfaatannya masih belum optimal. Banyak hasil penelitian yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.

8. Banyak masyarakat miskin yang tinggal di kawasan berisiko tinggi dan belum tersentuh program pemerintah

Banyak masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kediri yang tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, maupun pada kawasan kumuh. Minimnya akses terhadap hunian yang layak dan aman membuat mereka semakin rentan terhadap dampak bencana.

Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit untuk memilih lokasi hunian yang lebih aman, sehingga terpaksa bermukim di daerah dengan infrastruktur yang rentan terhadap bencana. Di wilayah perkotaan, permukiman padat dengan drainase buruk semakin memperbesar risiko banjir.

9. Jumlah infrastruktur yang berada di kawasan berisiko tinggi semakin meningkat

Meningkatnya jumlah infrastruktur di kawasan berisiko tinggi di Kota Kediri menimbulkan berbagai permasalahan yang memperburuk dampak bencana. Pembangunan yang semakin mendekati wilayah rawan banjir memperparah kondisi drainase

yang sudah tidak memadai, sehingga memperbesar potensi genangan saat hujan lebat. Lahan resapan air semakin berkurang karena banyaknya area yang terbangun, membuat aliran air tidak terserap dengan baik dan meningkatkan risiko banjir di daerah perkotaan.

Sebagian besar bangunan di Kota Kediri, terutama yang digunakan untuk jasa, perdagangan, dan industri, masih menggunakan atap dari seng atau bahan ringan lainnya yang rentan diterbangkan angin kencang. Selain itu, banyak bangunan yang tidak memiliki desain struktural yang kuat untuk menghadapi tekanan angin tinggi, sehingga rawan mengalami kerusakan saat terjadi puting beliung.

Mulai berkembangnya pembangunan ke daerah berlereng, terutama di sekitar Gunung Klotok, meningkatkan risiko tanah longsor. Bangunan seperti asrama dan fasilitas pendidikan yang berdiri di lereng terjal rentan terhadap longsor, sementara upaya mitigasi seperti perkuatan lereng atau pembangunan sistem drainase yang baik masih terbatas.

Aktivitas sesar lokal di sekitar Kota Kediri telah menyebabkan gempa berulang kali, tetapi masih banyak infrastruktur yang tidak didesain tahan gempa. Rendahnya kesiapsiagaan terhadap ancaman ini dapat meningkatkan dampak jika terjadi gempa yang lebih besar di masa depan.

2.4.2 Kesenjangan Kapasitas penanggulangan Bencana

1. Penanganan dampak bencana masih bersifat sektoral

Lemahnya koordinasi lintas sektor dan antar lembaga pemerintah di Kota Kediri menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan berbagai isu penting yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, termasuk penanggulangan bencana, pelayanan publik, dan pengembangan infrastruktur. Meskipun

masing-masing lembaga dan instansi memiliki tugas dan kewenangannya sendiri, ketidakselarasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sering kali memperlambat penyelesaian masalah yang kompleks di tingkat kota.

2. Regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat belum terintegrasi dengan baik

Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur penanggulangan bencana, regulasi tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh. Kota Kediri masih belum memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi dan respons bencana.

3. Regulasi terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terintegrasi dengan baik.

Peraturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Kediri masih belum optimal. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum karena pada penilaian mutu di aplikasi SPM terdapat penurunan nilai akibat belum disusunnya Dokumen Standar Pelayanan Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada oleh Satpol PP. Selain itu data capaian SPM BPBD Kota Kediri tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa beberapa indikator pelayanan mengalami penurunan, terutama dalam layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang menurun dari 100% pada 2019 menjadi 67% pada 2023. Demikian pula, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mengalami penurunan signifikan pada 2023.

Prioritas 6: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kota Kediri menghadapi berbagai kendala dalam mengantisipasi dan merespons ancaman seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta erupsi gunungapi. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya rencana kontingensi untuk masing-masing jenis bencana, sehingga koordinasi dalam penanganan darurat belum optimal. Selain itu, sistem peringatan dini yang belum tersedia untuk bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunungapi membuat masyarakat lebih rentan terhadap dampak bencana karena minimnya waktu untuk melakukan langkah antisipasi.

Di sisi lain, infrastruktur pendukung untuk evakuasi, terutama terkait erupsi gunungapi, masih sangat terbatas, sehingga berpotensi memperlambat proses penyelamatan saat terjadi bencana. Belum adanya jalur evakuasi yang memadai pada kawasan rawan bencana, khususnya erupsi gunung api, membuat masyarakat semakin rentan ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, penerapan Sistem Komando Operasi Darurat yang belum terlaksana menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan bencana di lapangan. Selain itu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana, Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban, serta prosedur perbaikan darurat dan pengerahan bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah terjauh. Ketiadaan SOP ini menyebabkan respons terhadap bencana sering kali berjalan lambat dan tidak terstruktur, sehingga memperburuk dampak yang ditimbulkan.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kota Kediri masih belum maksimal.

Minimnya perencanaan yang terstruktur, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya sistem peringatan dini membuat Kota Kediri berada dalam kondisi yang rentan ketika menghadapi ancaman bencana.

Prioritas 7: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Pemulihan pasca-bencana di Kota Kediri masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam layanan dasar, infrastruktur, perbaikan rumah, dan penghidupan masyarakat. Dampak bencana terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan sering terhambat akibat ketiadaan mekanisme pemulihan yang jelas. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih terhambat akibat implementasi kebijakan yang belum optimal.

Perbaikan rumah penduduk terdampak bencana belum berjalan optimal meskipun telah ada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Implementasinya telah dilakukan survey terhadap rumah rusak dibuktikan dengan adanya Dokumen Laporan Hasil Survei Pemulihan Rumah Akibat Kebakaran Tahun 2024, serta adanya rehabilitasi akibat kebakaran ditandai dengan adanya RAB Rehab Rumah Akibat Kebakaran Tahun 2024. Tetapi kegiatan yang ada belum mencakup pemulihan pasca bencana untuk keseluruhan bencana yang telah terjadi. Selain itu, belum adanya regulasi pemulihan ekonomi membuat banyak warga kehilangan sumber pendapatan tanpa dukungan yang cukup.

Keempat aspek ini yaitu perbaikan pelayanan masyarakat, pemulihan infrastruktur, perbaikan rumah, dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca-bencana, menjadi indikator penting dalam membangun ketahanan masyarakat dan pemerintah terhadap bencana. Namun, rendahnya perhatian terhadap prioritas ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam peningkatan

kapasitas pemulihan, sehingga proses rehabilitasi sering terhambat.

2.4.3 Ketercapaian RPJMD

1. Belum tuntasnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Kediri

Tingkat kemiskinan Kota Kediri sebesar 7,15% pada tahun 2023, masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pemerintah kota di seluruh Jawa Timur, meskipun angka kemiskinan selama rentang tahun 2015 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 22.196 jiwa. Perlunya perhatian untuk pengentasan kemiskinan di Kota Kediri harus diintegrasikan dengan berbagai bidang tidak hanya level sektoral. Database kemiskinan yang ada masih perlu dilakukan *updating* secara berkala untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan. Perlunya penanganan kemiskinan ekstrem sejumlah 3.002 jiwa yang tersebar di beberapa wilayah utamanya yang perlu menjadi perhatian di wilayah Kecamatan Pesantren. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya berbagai upaya dan program yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional, dalam menangani kemiskinan. Data dari Pangkalan Data Kesejahteraan Sosial Ekstrem (P3KE) menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem yaitu kelompok masyarakat yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang sangat rendah, tanpa akses memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan masih menjadi masalah besar di Kota Kediri.

2. Masih rendahnya kelurahan yang masuk dalam kategori kelurahan swasembada

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui tingkat perkembangan kelurahan. Evaluasi tahunan terhadap faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan,

keamanan, partisipasi masyarakat, serta kinerja pemerintahan menentukan apakah suatu kelurahan tergolong dalam kategori swasembada, swakarya, atau swadaya.

Namun, berdasarkan data perkembangan kelurahan tahun 2020–2023, masih sedikit kelurahan yang mencapai status swasembada. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kemandirian kelurahan.

3. Masih banyak bangunan di kawasan kumuh bahkan sebagian besar tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah lainnya.

Kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri masuk dalam kategori status kumuh ringan dengan status lahan legal. Meskipun berada di lahan legal, namun masih banyak bangunan di kawasan kumuh yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah lainnya. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri antara lain adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah dan kondisi proteksi kebakaran yang belum memenuhi standar pemenuhan pemukiman yang layak huni.

4. Ketimpangan struktur PDRB menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata di Kota Kediri

Ketimpangan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kediri menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata. PDRB, yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu daerah, menunjukkan ketidakseimbangan antara sektor-sektor ekonomi yang ada. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada kesenjangan sosial

dan ekonomi di kalangan penduduk Kota Kediri, yang semakin memperburuk kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Kota Kediri, dengan berbagai karakteristiknya, memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam, namun dominasi beberapa sektor tertentu dalam PDRB membuat perekonomian kota ini menjadi tidak merata. Sektor-sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa keuangan mendominasi perekonomian kota, sementara sektor pertanian, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk, justru cenderung terabaikan dan berkontribusi kecil terhadap total PDRB. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan. Hasil PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 PDRB Kota Kediri Tahun 2023

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kota Kediri (Juta Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	197.886,88
Pertambangan dan Penggalan	30,66
Industri Pengolahan	70.746.442,46
Pengadaan Listrik dan Gas	9.974,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.623,91
Konstruksi	1.782.766,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.362.537,38
Transportasi dan Pergudangan	543.071,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.669.614,65
Informasi dan Komunikasi	307.0731,79

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kota Kediri (Juta Rupiah)
Jasa Keuangan dan Asuransi	91.0419,99
Real Estate	455.918,23
Jasa Perusahaan	191.265,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	338.480,22
Jasa Pendidikan	780.099,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.305,45
Jasa lainnya	345.179,1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	91.631.347,8

Sumber: BPS Kota Kediri Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.13 sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan dominasi yang signifikan, menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Kediri. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB.

5. TPA Klotok sudah overload/melampaui kapasitas daya dukung daya tampungnya

TPA Klotok ini berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoagung dengan luas 4 Ha. TPA Klotok mengalami kelebihan kapasitas akibat terus meningkatnya volume sampah di Kota Kediri. Dengan kapasitas maksimal 140 ton per hari, jumlah sampah yang masuk semakin mendekati batas daya tampung, sementara produksi sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pengurangan sampah, yang baru mencapai 15,36% dari target 30%. Akibatnya, sampah yang masuk ke TPA tetap tinggi dan mempercepat

penurunan daya dukungnya. Jika tidak ada strategi pengelolaan yang lebih efektif, overload TPA Klotok akan semakin berdampak pada lingkungan dan efektivitas sistem persampahan di Kota Kediri.

6. Bertambahnya jumlah penduduk akan berkorelasi dengan penambahan timbulan sampah

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Kediri berbanding lurus dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, timbulan sampah mencapai 138.837 ton, meningkat menjadi 139.831 ton pada 2022, dan terus bertambah menjadi 140.084 ton pada 2023. Setiap individu menghasilkan rata-rata 2,5 liter sampah per hari, sehingga pertumbuhan penduduk akan terus memperbesar jumlah sampah yang harus dikelola. Dengan kondisi TPA Klotok yang sudah overload, ketidakseimbangan antara produksi dan pengelolaan sampah ini berisiko menyebabkan penumpukan sampah di lingkungan, meningkatkan polusi udara akibat pembakaran sampah ilegal, serta mempercepat degradasi kualitas tanah dan air di sekitar TPA.

7. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas hidup. Namun, di Kota Kediri, tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, serta masih minimnya partisipasi dalam program penghijauan dan pengelolaan sampah.

8. Belum disusunnya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) untuk menurunkan emisi GRK

Kota Kediri hingga saat ini belum memiliki Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) sebagai strategi khusus dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021, penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menurunkan emisi sebesar 29% dengan sumber daya dalam negeri dan 41% melalui kerja sama internasional pada tahun 2030.

Meskipun Kota Kediri telah melaporkan berbagai upaya penurunan emisi karbon melalui Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) dan tercatat menurunkan potensi emisi gas rumah kaca (CO₂EQ) 26.559,06 Ton pada tahun 2023, pencapaian ini belum didasarkan pada dokumen perencanaan daerah yang sistematis. Tanpa RAD GRK, langkah-langkah yang dilakukan cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan jangka panjang.

Ketiadaan RAD GRK dapat menghambat efektivitas mitigasi perubahan iklim karena tidak adanya pedoman yang jelas untuk setiap sektor. Hal ini juga dapat mengurangi optimalisasi peran Kota Kediri dalam kontribusi pengurangan emisi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penyusunan RAD GRK menjadi langkah krusial agar upaya mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

9. Belum optimalnya pengelolaan ASN baik dalam hal pelaksanaan kinerja, meritokrasi, kompetensi, jabatan fungsional dan peningkatan profesionalitas ASN

Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengukur sistem dalam manajemen sumber daya manusia menggunakan penilaian indeks Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang

politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tingkat penerapan Sistem Merit diukur dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Seiring dengan upaya perbaikan dalam manajemen ASN, nilai indeks Sistem Merit Kota Kediri mengalami kenaikan dari 138,5 (buruk) pada tahun 2020, meningkat menjadi 272,5 (baik) pada tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 306 (baik) pada tahun 2023.

10. Belum meratanya distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen utama dalam reformasi birokrasi, SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government).

Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk melakukan perbaikan pada komponen pelaporan kinerja antara lain dengan menyusun Pohon Kinerja, menyempurnakan proses penjabaran kinerja (*cascade down*), memperbaiki indikator kinerja individu menjadi berorientasi untuk meningkatkan kinerjanya, memaksimalkan upaya refocusing program, meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, dan mempercepat upaya reformasi birokrasi serta melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kota Kediri.

11. SAKIP pada beberapa perangkat daerah yang mengampu SPM dan berkaitan dengan kebencanaan perlu ditingkatkan

Perangkat daerah yang menangani SPM dan kebencanaan masih perlu meningkatkan implementasi SAKIP, terutama dalam hal perencanaan strategis, pengukuran kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu juga harus meningkatkan efektivitas perencanaan berbasis risiko dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi SAKIP pada bidang kebencanaan perlu lebih menitikberatkan pada aspek kesiapsiagaan, respons cepat, serta efisiensi penggunaan anggaran dalam kondisi darurat .

12. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Data menunjukkan bahwa Skor EKPPD Pemerintah Kota Kediri mengalami penurunan signifikan dari 3,4198 (status sangat tinggi) pada tahun 2020 menjadi 2,70 (status sedang) pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang

berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah belum maksimalnya pemenuhan SPM di berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang belum optimal, serta belum sepenuhnya terintegrasinya data dan indikator kinerja pada setiap perangkat daerah.

Masalah pokok yang terdapat dalam RPB Kota Kediri diperoleh dari rekomendasi hasil Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027, Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026, dan Indeks Ketahanan Daerah. Masing-masing masalah pokok akan dipaparkan dan diberi skor untuk memperoleh rumusan isu strategis. Berikut merupakan uraian masalah pokok dalam rencana penanggulangan bencana ini.

2.5 Akar Permasalahan Daerah

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan pokok penanggulangan bencana di Kota Kediri maka dapat dirumuskan akar permasalahan dari setiap pendekatan. Berikut ini adalah penjabaran setiap akar permasalahan yang telah dirumuskan dari masalah-masalah pokok setiap pendekatan:

1. Keterpaparan Risiko Bencana

Hasil pendalaman terhadap kajian risiko bencana diperoleh akar permasalahan sebagai berikut:

- a. Penataan pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman belum memperhatikan pengurangan risiko bencana
- b. Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana
- c. Rendahnya investasi (struktural dan non struktural) untuk mengurangi dampak bencana

2. Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana (IKD)

Akar permasalahan yang diperoleh dari kesenjangan pencapaian indeks kapasitas daerah sebagai berikut:

- a. Lemahnya Koordinasi antar lembaga/lintas sektor di Kota Kediri
- b. Rendahnya kesiapsiagaan dan respon penanganan darurat bencana di Kota Kediri
- c. Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana di Kota Kediri

3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis Pembangunan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana

Identifikasi akar permasalahan dari kesenjangan pencapaian isu strategis pembangunan daerah (RPD) terhadap penanggulangan bencana sebagai berikut:

- a. Belum terintegrasinya upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat
- b. akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk memaksimalkan pelaksanaan SPM .

2.6 Rumusan Isu Strategis

Rumusan isu strategis merupakan daftar prioritas permasalahan yang akan diselesaikan dalam RPB Kota Kediri tahun 2026-2030. Penilaian isu strategis berdasarkan tingkat relevansi dilakukan melalui proses FGD yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait kebencanaan di Kota Kediri. Rentang nilai yang diberikan dalam skoring adalah 1-5. Angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria dan angka 5 menunjukkan sangat relevan terhadap kriteria antara lain:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain

3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 2. 14 hasil Skoring penilaian Isu Strategis

No	Isu Strategis	Pembobotan berdasarkan kriteria strategis					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Penataan pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman belum memperhatikan pengurangan risiko bencana	1	3	2	2	3	11
2	Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang memperhatikan aspek mitigasi bencana	5	4	5	2	4	20
3	Rendahnya investasi (struktural dan non struktural) untuk mengurangi dampak bencana	1	5	2	4	5	17
4	Lemahnya koordinasi antar lembaga atau lintas sektor di Kota Kediri	4	4	3	5	4	20
5	Rendahnya kesiapsiagaan dan respons penanganan darurat bencana di Kota Kediri	4	4	3	4	1	16
6	Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana di Kota Kediri	5	4	3	5	4	21
7	Belum terintegrasinya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat	5	4	3	4	5	21
8	Minimnya upaya mitigasi adaptasi perubahan iklim serta rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	2	4	2	3	5	16

No	Isu Strategis	Pembobotan berdasarkan kriteria strategis					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk memaksimalkan pelaksanaan SPM	4	4	3	5	4	20

Sumber: FGD, 2024

Isu strategis prioritas berdasarkan hasil penilaian adalah isu:

1. Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana
2. Lemahnya Koordinasi antar lembaga/lintas sektor di Kota Kediri
Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana di Kota Kediri
3. Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana di Kota Kediri
4. Belum terintegrasinya upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.
5. akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk memaksimalkan pelaksanaan SPM.

Penggabungan beberapa isu strategis dilakukan dalam proses FGD untuk mengakomodir isu strategis yang tidak masuk dalam prioritas. Hasil penggabungan disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Isu Strategis RPB Kota Kediri

Isu Strategis	Cakupan Point
Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana	1,2
Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana	5,6,3
Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim	7,8,9

Sumber: FGD, 2024

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1 Nasional

A. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025 dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Visi RIPB yaitu **“Mewujudkan Indonesia Tanggung Bencana Untuk Pembangunan Berkelanjutan”**. Visi tersebut didukung dengan 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana adalah meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai dengan sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang - undang yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana

2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 2020-2024 dan berakhir pada periode 5 yaitu pada tahun 2040-2044. Pembagian 5 tahapan berdasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap. Adapun fokus capaian pada penanggulangan bencana tahun 2026-2030

1. Terwujudnya peraturan perundang-undang yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi

8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Visi pada RPJMN 2025-2029 mengikuti visi presiden dan wakil presiden periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Terwujudnya visi RPJMN 2025-2029 terkait perencanaan penanggulangan bencana tercermin dalam salah satu misi yaitu “memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Misi tersebut memiliki program prioritas berupa pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna yang diwujudkan dengan kegiatan prioritas berupa:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
2. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
3. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana
4. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
5. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

C. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029

Tujuan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029 adalah meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan.

Sasaran:

1. Mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana melalui peningkatan kualitas kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Mengurangi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana melalui peningkatan efektivitas upaya pencegahan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
3. Meningkatkan daya lenting di daerah terdampak melalui peningkatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Permasalahan:

1. Banyaknya Jumlah Penduduk Terdampak Bencana Belum optimalnya tindakan pengamanan, penyelamatan, dan perlindungan masyarakat
2. Banyaknya Kerusakan Fisik (Infrastruktur dan Bangunan) dan Lingkungan Akibat Bencana
3. Tingginya Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Bencana dan Kemampuan (Daya Lenting) Masyarakat untuk Pulih Kembali dari Bencana Memerlukan Waktu yang Cukup Lama

Isu strategis:

1. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi
2. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim
3. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi
4. Potensi Kejadian Konflik Sosial
5. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana

6. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak
7. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan
8. Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global

Kebijakan penanggulangan bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029

1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif
2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multipihak dalam Penanggulangan Bencana
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana
4. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana
5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan
6. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Jawa tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada: (a) pengembangan pendidikan aman bencana; (b) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas; (c) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; (d) peningkatan kualitas dan - 42 - ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana; dan (e) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik

3.1.2 Daerah

A. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2027

Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen yang disusun secara komprehensif oleh pemerintah daerah untuk mengelola risiko dan respons terhadap berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor. Dokumen RPB menjadi landasan penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Isu strategis Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur:

Isu strategis 1: Belum optimalnya regulasi, sistem birokrasi, dan anggaran atau pembiayaan untuk penanggulangan bencana

Tujuan: Optimalnya regulasi, sistem birokrasi, dan anggaran atau pembiayaan untuk penanggulangan bencana

Sasaran:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong upaya penanggulangan bencana secara efektif dan mandiri di tingkat daerah
2. Terlaksananya mekanisme kelembagaan lintas daerah maupun sektoral dalam upaya penanggulangan bencana
3. Meningkatnya penganggaran bagi upaya penanggulangan bencana

Isu strategis 2: Rendahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap risiko bencana

Tujuan: Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah dalam penanggulangan bencana

Isu strategis 3: Belum optimalnya partisipasi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana

Tujuan: Meningkatkan partisipasi dan kerjasama unsur pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dan GEDSI

Sasaran:

1. Adanya peningkatan kapasitas unsur pentahelix non pemerintah (masyarakat, akademisi, sektor usaha, dan media) dalam penanggulangan bencana yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dan GEDSI
2. Adanya kemitraan aktif multipihak (pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor usaha, dan media) dalam penanggulangan bencana yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dan GEDS

Isu strategis 4: Belum optimalnya penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana

Tujuan: Menguatnya implementasi sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana

Sasaran:

1. Terlaksananya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan optimal
2. Terlaksananya sistem pemulihan pasca-bencana

Isu strategis 5: Kondisi lingkungan alam dan perubahannya (termasuk faktor perubahan iklim) yang meningkatkan kerentanan bencana

Tujuan: Menurunnya risiko akibat lingkungan alam dan perubahan iklim.

Sasaran:

1. Terimplementasinya proses penilaian risiko bencana yang reliabel dan valid

2. Terkendalinya perubahan lingkungan alam dengan penyelenggaraan penataan ruang
3. Meningkatnya sistem pencegahan dan mitigasi struktural untuk pengurangan risiko bencana

B. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah, untuk Kestinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026; dan Pedoman pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan tahun 2025-2026 Daerah (APBD). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana. RPD menjadi dasar untuk mengintegrasikan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana ke dalam agenda pembangunan daerah. Dengan memasukkan isu penanggulangan bencana ke dalam RPD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara terencana. Program mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, dapat didanai melalui mekanisme anggaran pembangunan daerah. Isu Strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 meliputi:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
3. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Sanitasi & Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

C. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri 2025-2029

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.

Kota Kediri menjadi salah satu kota menengah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi magnet dan pusat kegiatan bagi masyarakat Kediri Raya yang mencakup Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Dengan memperhatikan visi nasional dan provinsi serta mempertimbangkan potensi, karakteristik, tantangan dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) maka visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2045 adalah **Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.**

Visi Kota Kediri didetailkan dalam beberapa sasaran utama visi agar lebih spesifik dan terukur. Adapun untuk Sasaran utama Visi Kota Kediri adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita dengan indikator capaian berupa PDRB per-kapita (Rp Juta)

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan indikator capaian berupa tingkat kemiskinan (%) dan rasio gini (Indeks)
3. Penguatan Iklim Investasi dalam Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan indikator capaian berupa Nilai Akumulasi Realisasi Investasi (Miliar)
4. Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat, dengan indikator capaian berupa Indeks Pembangunan Manusia
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission, dengan indikator capaian berupa Penurunan intensitas emisi GRK (%)

Tahapan pondasi pembangunan jangka menengah dibagi menjadi 4 tema besar yaitu:

- Tahap 1 2025-2029 : Penguatan Pondasi Transformasi Kota Kediri
- Tahap 2 2030-2034 : Percepatan Proses Transformasi Kota Kediri
- Tahap 3 2035-2039 : Kota Kediri Global
- Tahap 4 2040-2045 : Perwujudan Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Adapun misi pada pondasi pembangunan jangka menengah Tahap I 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan;

Misi 2: Penataan kelembagaan dan regulasi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;

Misi 3: Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;

Misi 4: Memperkuat sektor unggulan dan SDM yang berkompeten untuk kemudahan penyerapan tenaga; dan

Misi 5: Penyediaan infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan Tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran indikator makro daerah pada periodisasi Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Target Indikator Ekonomi Makro Kota Kediri Tahun 2025-2029

No.	Indikator Makro	Taget Kota Kediri 2025	Target Kota Kediri 2029
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,0-4,0	3,5-4,5
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,58-4,36	5,31-4,31
3.	Indeks Pembangunan Manusia	80,90-81,55	84,58-85,31
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00-3,50	3,50-3,30
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,387-0,385	0,376-0,374

Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 adalah **Penguatan Pondasi Transformasi Kota Kediri**. Adapun Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025 – 2029, yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana adalah fokus agenda ke V tentang **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**. Adapun fokus dari agenda pembangunan tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi aktif semua kelompok etnis dan budaya dalam kegiatan sosial dan budaya;
2. Pelestarian warisan budaya dan penguatan nilai-nilai budaya lokal melalui berbagai inisiatif pelestarian dan pendidikan;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati;

4. Pengembangan regulasi terkait bangunan dan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana;
5. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; dan
6. Penguatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Pada poin ke-4, yang menekankan regulasi bangunan dan tata ruang sebagai upaya pengurangan risiko bencana, kebijakan ini berfokus pada penyusunan regulasi tata ruang dan tata bangunan yang mengutamakan aspek ketahanan bencana. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan mencakup penyusunan dan penerapan regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan pengawasan yang teratur terhadap izin pemanfaatan ruang dan bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ketahanan bencana. Sementara itu, poin ke-5 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan mencakup upaya penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

3.2 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 manajemen bencana merupakan proses dinamis yang berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi kehidupan dan lingkungan dari dampak bencana serta memulihkan kondisi masyarakat pasca-bencana. Tahapan kerangka penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga yaitu pra-bencana, saat

bencana, dan pasca-bencana. Adapun jabaran dari kerangka kerja penanggulangan bencana sebagai berikut:

3.2.1 Pra-Bencana

Kerangka kerja pra bencana merupakan bagian dari manajemen risiko bencana yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menghadapi potensi bencana. Kerangka kerja pra bencana berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan sebelum bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Tindakan yang dapat dilakukan pada tahapan pra-bencana yaitu:

- a. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
- d. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

3.2.2 Saat Bencana

Kerangka kerja saat bencana merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada saat kondisi darurat secara cepat dan efektif setelah bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi dampak bencana terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, harta benda dan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Tindakan yang dapat dilakukan pada tahapan tanggap darurat yaitu:

- a. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- b. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan
- c. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

3.2.3 Pasca Bencana

Kerangka kerja pasca bencana merupakan rangkaian yang dilakukan setelah bencana terjadi dengan tujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan, membangun Kembali infrastruktur, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang akan datang. Fokus utama pada pasca bencana adalah rehabilitasi, rekonstruksi, dan pengurangan risiko bencana. Adapun prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca-Bencana berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Penyelenggaraan Pemulihan Pasca bencana adalah upaya terkoordinasi untuk memulihkan kondisi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan setelah bencana. Proses ini mencakup rehabilitasi, rekonstruksi, dan penguatan ketahanan masyarakat melalui pengurangan risiko bencana. Penyelenggaraan pemulihan dilakukan dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan menciptakan masa depan yang lebih aman.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

1. Pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
2. Penanganan psikososial untuk korban bencana.
3. Pemulihan mata pencaharian, seperti memberikan bantuan ekonomi kepada petani, pedagang, atau pekerja kecil.
4. Pengelolaan limbah dan puing-puing akibat bencana.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. Pembangunan Kembali rumah dan gedung publik yang hancur

2. Relokasi masyarakat dari zona rawan bencana ke area yang lebih aman
3. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan irigasi
4. Restorasi ekosistem yang rusak, seperti hutan, Pantai, atau area konservasi

Penyelenggaraan pemulihan pasca-bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. Penyusunan tata ruang berbasis risiko
2. Penguatan sistem peringatan dini
3. Pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan

Tabel 3. 2 Peran dan Mandat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh BPBD

Peran	Pra-Bencana	Saat Bencana	Pasca-Bencana
Koordinasi	1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana 2. Penyusunan perencanaan 3. Penanggulangan bencana 4. Pengurangan risiko bencana; 5. Pembuatan peta rawan bencana; 6. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 7. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi	1. Penentuan standar kebutuhan minimum 2. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana 3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana 4. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana 5. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat	1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi 2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.
Komando		1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat	

Peran	Pra-Bencana	Saat Bencana	Pasca-Bencana
		Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. Penyelamatan b. Pengerahan sumber daya manusia c. Pengerahan peralatan d. Pengerahan logistik 3. Mengendalikan para pejabat yang berwenang mewakili instansi atau lembaga	
Pelaksana	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana 2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan	1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: 2. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 3. penentuan status keadaan darurat bencana; 4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;	1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik

Peran	Pra-Bencana	Saat Bencana	Pasca-Bencana
	penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 4. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: 5. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 6. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 7. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 8. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; 9. penyiapan lokasi evakuasi; 10. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 11. penyediaan dan penyiapan bahan, barang,	5. pemenuhan kebutuhan dasar; 6. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 7. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Peran	Pra-Bencana	Saat Bencana	Pasca-Bencana
	dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 12. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: 13. mengamati gejala bencana; 14. menganalisis data hasil pengamatan; 15. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; 16. menyebarluaskan hasil keputusan; dan 17. mengambil tindakan oleh masyarakat		

Sumber: Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, BPBD merupakan unsur perangkat daerah yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai sub urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah tidak hanya dilakukan oleh BPBD. Berdasarkan hasil identifikasi tugas fungsi, serta pemetaan peran yang telah dilaksanakan terdapat pembagian peran antara pihak di Kota Kediri sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Peran Organisasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
PD	1.	1.	1.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2. Penyusunan dan review KRB dan RPB 3. Fasilitasi pembentukan Forum PRB 4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 5. Penyusunan Rencana Kontingensi 6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 7. Melakukan penelitian / riset kebencanaan 8. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 9. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana 10. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana	2. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 3. Pemantauan informasi kebencanaan 4. Penyebarluasan peringatan dini 5. Penyiapan peralatan dan logistik 6. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 7. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 8. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 9. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 10. Penetapan status darurat bencana 11. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	2. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparaturnya tentang pengelolaan risiko bencana.

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	11. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 12. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 13. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparaturnegara, masyarakat, dunia usaha. 14. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana 15. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat 16. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana 17. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 18. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 19. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	12. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 13. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman 14. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas 15. Penilaian kebutuhan pasca bencana 16. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasa	

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	20. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 21. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana 22. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 23. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana 24. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 25. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 26. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini 27. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini 28. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan		

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	informasi peringatan bencana		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah 2. Pelaksanaan Musrenbag Kabupaten/ kota 3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Membantu menyusun rencana operasi tanggap darurat khususnya terkait perencanaan dan penganggaran	1. Membantu menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Memantau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penyusunan kebijakan teknis terkait standar bangunan tahan bencana 2. Perencanaan, pengaturan tata bangunan, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan tahan bencana.	1. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 2. Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara 4. Pembangunan sarana dan prasarana umum,

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	3. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 4. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih 5. Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air untuk pencegahan banjir 6. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir 7. Pemasangan/pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir 8. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir 9. Penyusunan dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengurangi risiko bencana 10. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan	3. Pembangunan hunian sementara	- fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 5. Pembangunan hunian tetap 6. Pembangunan sarana pelayanan publik 7. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 8. relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 9. rehabilitasi rumah warga terdampak bencana

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	ruang dalam rangka mitigasi bencana 11. Menyiapkan jalur evakuasi 12. Menyiapkan alat berat 13. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir		
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 2. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 3. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan 4. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan	1. Pemenuhan kebutuhan pangan	1. Perbaikan sarana pertanian 2. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian 3. Pendampingan peningkatan pertanian

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	5. Menyiapkan lumbung pangan 6. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim 7. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak 8. Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar 9. Pemantauan bahaya kebakaran lahan		
Dinas Perhubungan	1. Sosialisasi daerah rawan bencana pada jalan dan jalur perhubungan darat 2. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada alur transportasi darat 3. Penyiapan jalur evakuasi untuk transportasi darat 4. Pemetaan dan penandaan akses alternatif transportasi di wilayah rawan bencana.	1. Penyiapan kendaraan/angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Koordinasi pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran evakuasi. 3. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 4. Menyediakan sarana kendaraan	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum melalui evaluasi kerusakan infrastruktur. 2. Perbaikan rambu jalan, fasilitas transportasi, dan infrastruktur pendukung. 3. Pengadaan kembali sarana transportasi umum yang rusak.

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
			4. Penyusunan laporan evaluasi terkait dampak bencana pada sektor transportasi serta perencanaan penguatan sistem untuk kejadian bencana berikutnya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Menyediakan sistem perizinan daring untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha. 2. Memastikan persyaratan perizinan sesuai SOP dan melatih petugas untuk respons situasi bencana. 3. Mengidentifikasi dan mempromosikan lokasi investasi aman dari risiko bencana. 4. Menyediakan insentif kebijakan penanaman modal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.	1. Pelayanan dasar pemerintahan pada situasi darurat bencana 2. Menyediakan layanan pengaduan khusus terkait perizinan selama bencana. 3. Memberikan panduan lokasi aman bagi investor untuk menjaga kelangsungan usaha. 4. Memastikan izin sementara bagi investasi strategis untuk tetap beroperasi selama bencana.	1. Mempercepat proses perizinan untuk pembangunan ulang infrastruktur vital. 2. Memberikan dispensasi atau insentif izin bagi usaha yang mendukung pemulihan ekonomi. 3. Mengarahkan investasi baru untuk mendukung pembangunan tahan bencana. 4. Memberikan insentif khusus kepada investor yang

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
			berkontribusi dalam rehabilitasi daerah.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1. Menginventarisasi aset budaya, objek dan tujuan wisata, fasilitas olahraga dan kegiatan kepemudaan di daerah rawan bencana 2. Menyusun program perlindungan budaya, pengembangan pariwisata yang Tangguh bencana. 3. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata dan fasilitas olahraga 4. Memasang denah dan rambu evakuasi di objek wisata dan fasilitas olahraga 5. Pembentukan organisasi kepemudaan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana 6. Mengadakan pelatihan mitigasi bencana untuk pengelola objek wisata, pelaku seni, dan komunitas olahraga.	1. Pelibatan organisasi kependudukan dalam kegiatan tanggap darurat 2. Mendukung perlindungan dan evakuasi aset budaya, objek wisata, serta fasilitas olahraga terdampak. 3. Memberikan bantuan kepada komunitas seni, pariwisata, pemuda, dan olahraga yang terdampak bencana.	1. Melaksanakan program pemulihan untuk objek wisata, fasilitas budaya, dan olahraga yang terdampak seperti: perbaikan infrastruktur pariwisata, fasilitas budaya dan olahraga, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, fasilitas budaya dan olahraga, dan perbaikan layanan destinasi wisata, budaya dan olahraga.

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	1. Penyusunan kebijakan dan program penguatan koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja dalam menghadapi potensi bencana. 2. Melakukan pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi risiko bencana.	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi, pasar dan perdagangan 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana 3. Mengkoordinasikan dukungan operasional, seperti logistik dan perlindungan tenaga kerja terdampak. 4. Mendukung stabilitas usaha mikro dan koperasi selama masa darurat bencana.	1. Pendampingan pemulihan sektor usaha mikro, koperasi, dan tenaga kerja melalui pelatihan, pendampingan, serta pembiayaan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mitigasi bencana melalui pelatihan. 2. Membentuk kelompok perempuan tanggap bencana. 3. Mengembangkan kebijakan perlindungan anak dalam situasi bencana.	1. Memberikan dukungan kepada perempuan terdampak bencana. 2. Memastikan kebutuhan khusus perempuan terpenuhi di pengungsian. 3. Menyediakan ruang aman bagi anak-anak. 4. Memberikan layanan perlindungan darurat bagi anak terdampak. 5. Mengelola data penduduk terdampak.	1. Pemulihan ekonomi perempuan terdampak. 2. Memberikan pelatihan keterampilan untuk perempuan. 3. Pemulihan psikososial anak. 4. Memberikan layanan pendidikan darurat. 5. Menyusun evaluasi dampak bencana

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	4. Meningkatkan kesadaran anak tentang kesiapsiagaan. 5. Menyusun data keluarga rentan bencana. 6. Sosialisasi pentingnya perencanaan keluarga untuk mitigasi risiko. 7. Mengintegrasikan program KB dalam strategi pengurangan risiko bencana.	6. Mengintegrasikan kebutuhan populasi dalam penanganan darurat. 7. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi di lokasi pengungsian.	- pada dinamika kependudukan. 6. Mengembangkan kebijakan penduduk berbasis pemulihan pasca bencana. 7. Melanjutkan layanan KB pasca bencana. 8. Memberikan konseling kesehatan reproduksi
Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan Kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB 3. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana Pemulihan psikososial dasar	1. Perbaikan pusat layanan Kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan Kesehatan 3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana. 7. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 8. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 9. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana. 11. Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Dinas Sosial	1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan dan mitigasi,	1. Kerja sama dan pengelolaan logistik bencana	1. Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial 2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi 3. Memberikan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi 4. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial 5. Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana 6. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 3. Pelayanan dukungan psikososial	2. Melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial 3. Pelayanan dukungan psikososial
Dinas Pendidikan	1. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 2. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana. 3. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	1. Penyiapan pendidikan darurat 2. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 3. Memberikan bantuan alat tulis dan seragam bagi siswa	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah 3. Perbaikan tata kelola pendidikan

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	4. Program SPAB		
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan	1. Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 2. Penyusunan kebijakan teknis dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan persampahan dan limbah B3 3. Perencanaan program dibidang pengelolaan persampahan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	1. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1. Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten atau kota 2. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga	1. Pelayanan administrasi kependudukan di pengungsian 2. Penerbitan dokumen kependudukan darurat	1. Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 4. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Penyusunan rencana kegiatan bidang permukiman 2. Perumusan kebijakan dan pedoman perencanaan, pencegahan, pengendalian, penataan, peningkatan kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh serta pengelolaan pertanahan 3. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 4. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana 2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 3. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 5. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	1. Pelaksanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program 2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta PSU korban bencana atau relokasi 3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
		kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	sebelumnya yang belum tertangani
Satpol PP	1. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana	1. Penegakan trantibum 2. Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah 3. Respons Cepat Darurat Bencana 4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Penegakan trantibum
Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah 2. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	1. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Menyediakan fasilitas penyimpanan barang yang aman dari bencana	1. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
		2. Memantau dan mengendalikan harga barang pasar	penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pengamanan arsip dan dokumen penting	1. Pengamanan arsip dan dokumen penting 2. Penyediaan Cadangan informasi	1. Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang 2. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 3. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengelolaan sumber daya manusia untuk penanganan bencana	1. Pengelolaan sistem kepegawaian selama bencana	1. Dukungan pemulihan layanan publik 2. Penyesuaian dan Redistribusi Sumber Daya Manusia
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset	1. Optimalisasi pendapatan daerah 2. Pengelolaan aset daerah	1. Pengelolaan dana darurat dan mendesak 2. Pengamanan barang milik daerah	1. Pengelolaan keuangan untuk pemulihan 2. Inventarisasi dan penilaian kerusakan aset
TNI dan POLRI			

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
POLDA Jatim dan KODAM V/Brawijaya	1. Sosialisasi risiko bencana 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana 3. Penyiapan personil dan peralatan penunjang	1. Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 3. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan dan pertolongan darurat 5. Pemulihan keamanan dan ketertiban 6. Dukungan pemulihan infrastruktur penting	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban
Instansi Vertikal			
BMKG	1. Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidro meteorologi dan geologi 2. Penyebarluasan informasi cuaca	1. Penyebarluasan data terkait bencana 2. Pemutakhiran data kebencanaan 3. Menyebarluaskan informasi melalui Early Warning System (EWS)	1. Pembaruan area kerentanan 2. Analisis peluang kejadian bencana
Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS)	1. Penguatan sumber daya tim SAR 2. Edukasi masyarakat terkait kebencanaan	1. Pembentukan unit siaga 2. Pengumpulan potensi tim SAR yang siap bergerak ke lokasi bencana	1. Dukungan pemulihan pasca bencana

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	3. Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi	3. Penyiapan peralatan evakuasi 4. Pemetaan dan mobilitasi tim SAR ke lokasi bencana 5. Melakukan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan korban 6. Mengumpulkan data jumlah korban bencana 7. Mengarahkan tim ke lokasi bencana	
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)	1. Pengawasan penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung	1. Dukungan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana	1. Pendataan permukiman terdampak bencana 2. Fasilitasi pengadaan lahan untuk bangunan permukiman 3. Persiapan bangunan rumah sementara 4. Rehabilitasi rumah terkena dampak bencana 5. Pembangunan rumah sementara

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
BBWS Brantas dan Bengawan Solo	1. Perencanaan survei daerah rawan banjir, banjir bandang, dan longsor di daerah masing-masing 2. Melakukan pemantauan di daerah aliran sungai: DAS Bengawan solo, DAS Brantas	1. Penyediaan peralatan yang mendukung kesiapsiagaan bencana 2. Mobilisasi peralatan 3. Melakukan normalisasi pada DAS	1. Rehabilitasi sungai dan DAS 2. Perbaikan alur sungai 3. Pemasangan bronjong 4. Perbaikan tanggul
Masyarakat, Media, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi			
Organisasi kemasyarakatan	1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait anggaran penanggulangan bencana 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana 4. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 5. Pengembangan DESTANA, KATANA, SPAB, SANGGUB 6. Sosialisasi pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan penanggulangan bencana	1. Sosialisasi terkait bencana 2. Penyiapan peralatan dan petugas 3. Melakukan asesmen 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan korban 5. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 6. Pelayanan kesehatan darurat 7. Pelayanan psikososial 8. Pemenuhan kebutuhan dasar 9. Pelayanan kesehatan 10. Pelayanan psikososial	1. Bantuan pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Pembangunan posko 4. Dukungan pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	7. Audiensi dengan unsur pemerintah atau pemangku kebijakan untuk bisa diberikan edukasi atau wawasan terkait PRB 8. Advokasi untuk menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana		
Lembaga Usaha (Swasta)	1. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 3. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana	1. Dukungan bantuan kepada korban terdampak bencana	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. penyediaan hunian sementara 3. peningkatan perekonomian masyarakat 4. pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
PLN	1. edukasi masyarakat terkait kebencanaan 2. memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkait kelistrikan di daerah rawan bencana	1. perbaikan jaringan listrik 2. penyediaan energi listrik cadangan	1. perbaikan jaringan listrik 2. penyediaan energi listrik cadangan

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
PDAM	1. edukasi masyarakat terkait kebencanaan	1. penyediaan air bersih 2. memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkait sumber daya air di daerah rawan bencana	1. perbaikan infrastruktur air bersih 2. penyediaan air bersih
Media	1. penyediaan informasi terkait potensi bencana 2. menjalin kerjasama khusus dengan pemerintah 3. pelatihan peliputan bencana 4. pelatihan <i>survival</i> / saat darurat bencana	1. penyediaan informasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Penyebarluasan informasi terkait kondisi terkini di kawasan terdampak bencana 3. Fasilitasi penghimpunan donasi 4. Penyebarluasan informasi terkait kondisi terkini di kawasan terdampak bencana 5. Liputan kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana susulan	1. Penyebarluasan informasi terkait kondisi terkini di kawasan terdampak bencana 2. Mendorong pemberitaan yang mengedepankan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3. Pemulihan perekonomian Masyarakat 4. Penyediaan hunian sementara 5. Peningkatan perekonomian masyarakat
Perguruan Tinggi	1. Melakukan penelitian terkait kebencanaan 2. Memberikan pendidikan kebencanaan kepada	1. Penyiapan relawan bencana 2. Fasilitasi penggalangan donasi	1. Layanan dukungan psikososial 2. Pemulihan ekonomi local

Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Saat Pasca Bencana
	masyarakat terutama di daerah rawan bencana 3. Penyusunan kurikulum untuk edukasi kebencanaan 4. Adanya kegiatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan BPBD serta pemerintah daerah 5. Adanya andil perguruan tinggi untuk penguatan kapasitas Masyarakat 6. Penyiapan dan edukasi kepada calon relawan bencana	3. Pendataan korban bencana 4. Mengirimkan relawan kampus ke daerah terdampak bencana 5. Mengirimkan relawan ke daerah terdampak bencana 6. Layanan dukungan psikososial	3. Kajian dampak bencana 4. Pemberian dukungan untuk pemulihan ekonomi lokal

Sumber: FGD, 2024

3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. Secara rinci skema pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan	Pra-bencana		Saat Bencana	Pasca-bencana	
Penyelenggaraan	Situasi tidak terjadi bencana	Situasi terdapat potensi bencana		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Pendanaan	Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD				
	Dana Kontingensi		Dana Siap Pakai	Dana bantuan perpola hibah	
	Dana dari Masyarakat				

3.3.1 Sumber Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 penyaluran dana bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari penyaluran pada tahap prabencana, penyaluran pada tahap darurat bencana, penyaluran pada tahap pasca-bencana terutama kegiatan pemulihan dan penyaluran untuk pendanaan transfer risiko. Penyaluran dana bersama dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari pemerintah daerah dan atau kementrian negara atau lembaga kepada BNPB.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
3. Masyarakat

Masyarakat ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN

ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PP No.22/ 2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

- a. Memfasilitasi masyarakat akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi atau lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditetapkan dalam anggaran BPBD.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pemerintah daerah menyediakan dana siap pakai berupa belanja tidak terduga (BTT) yang berasal dari APBD. Belanja Tidak Terduga

(BTT) digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Teknis pencairan dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) mengacu pada PERMENDAGRI 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang tetap mengacu pada PP No 12 Tahun 2019 dimana Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. Mempertimbangkan ketatnya aturan dalam

memanfaatkan BTT maka setiap kejadian bencana yang dilaporkan BPBD dengan segera perlu melakukan kaji cepat untuk memastikan proses penanganan yang diperlukan beserta sumber pembiayaan yang diperlukan.

sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No 59 tentang Penyelenggaraan Perkotaan, pada pasal 24 menyebutkan bahwa Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan juga harus memperhatikan kegiatan ekonomi Perkotaan, sosial budaya, jenis dan fasilitas transportasi yang hemat waktu, tahan terhadap musim, serta tangguh bencana. Secara rinci kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi: penyediaan layanan informasi tentang bencana; pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kementerian keuangan RI menerapkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Salah satu titik berat pada strategi PARB adalah berupa strategi untuk penyediaan dana untuk pembiayaan risiko bencana secara memadai dan berkelanjutan. Strategi penyediaan dana tersebut berkaitan dengan layering risiko bencana, yaitu faktor frekuensi terjadinya bencana dan dampak kerugian ekonomi dan fisik dari bencana. Instrumen utama dalam strategi PARB adalah berupa Pooling Fund Bencana (PFB). PFB

adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana secara berkelanjutan dengan maksud untuk melindungi APBN / APBD dari tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Dana Pooling Fund Bencana dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan. Memperhatikan kondisi dan karakteristik kebencanaan di wilayah Kota Kediri maka, pemerintah Kota Kediri perlu segera untuk dapat mengakses dan memanfaatkan skema pendanaan untuk mengantisipasi segala bentuk potensi risiko bencana yang mungkin akan terjadi.

3.3.2 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah daerah atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai pelaksanaan yang meliputi tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Berdasarkan kewenangannya BPBD mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan pada APBN dan APBD.

a. Pengelolaan Dana Pra-bencana

Dana penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi dua situasi, yaitu saat tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi

1. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dana meliputi:
 - a) Fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - b) Program pengurangan risiko bencana
 - c) Program pencegahan bencana

- d) Pemanduan perencanaan pembangunan dengan penanggulangan bencana
- e) Penyusunan analisis risiko bencana
- f) Fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- g) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
- h) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

2. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dana meliputi:

- a) Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain.
- b) Pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- c) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Pengelolaan Dana Saat Bencana

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi atau lembaga terkait
- 2. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB

3. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

1. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan
5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana

Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang atau jasa untuk:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
2. Pertolongan darurat
3. Evakuasi korban bencana
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
5. Pangan
6. Sandang
7. Pelayanan kesehatan
8. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh kepala BNPB dalam peraturan badan nasional penanggulangan bencana nomor 4 tahun 2020 tentang dana siap pakai (DSP).

c. Pengelolaan Dana Pasca-bencana

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana yang digunakan untuk kegiatan

1. Kegiatan rehabilitasi, meliputi:

- a) Perbaikan lingkungan daerah bencana
- b) Perbaikan prasarana dan sarana umum
- c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d) Pemulihan sosial psikologis
- e) Pelayanan Kesehatan
- f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g) Pemulihan sosial ekonomi budaya
- h) Pemulihan keamanan dan ketertiban
- i) Pemulihan fungsi pemerintahan
- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik

2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- a) Pembangunan Kembali prasarana dan sarana
- b) Pembangunan Kembali sarana sosial masyarakat
- c) Pembangkitan Kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat
- f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- g) Peningkatan fungsi pelayanan publik
- h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca-bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari APBN. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga

terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun sebagai jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah.

Sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Tujuan dan Sasaran RPB Kota Kediri dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran RPB Kota Kediri 2026-2030

Tujuan	Isu Strategis	Sasaran
Terwujudnya Ketangguhan Kota Kediri dalam penanggulangan Bencana melalui keselarasan pembangunan dan koordinasi lintas sektor	Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana	a) Terintegrasinya regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat b) Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga pemerintahan di Kota Kediri
	Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi	a) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap

Tujuan	Isu Strategis	Sasaran
	antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana	kebersihan lingkungan serta berwawasan Kesehatan b) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana c) Meningkatkan respon penanganan darurat bencana Terciptanya mekanisme pemulihan pasca-bencana di Kota Kediri yang efektif
	Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim	a) Tersedianya infrastruktur yang memperhatikan aspek kebencanaan b) Mengoptimalkan penanganan persampahan di Kota Kediri c) Terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana d) Terintegrasinya data pembangunan yang mendukung pelaksanaan SPM sub kebencanaan di kawasan rawan bencana

Sumber: FGD, 2024

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kota Kediri dengan efektif dan efisien. Strategi merujuk pada rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai untuk mengurangi dampak bencana dan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan adalah fokus utama dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan. Arah kebijakan mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam pembuatan keputusan kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri Tahun 2026-2030 termuat dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan RPB Kota Kediri 2026-2030

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana	Terintegrasinya regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat secara komprehensif	Penguatan dan harmonisasi sistem regulasi tatakelola penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Sinkronisasi dan harmonisasi sistem tatakelola bencana
	Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga pemerintahan di Kota Kediri	Terlaksananya koordinasi lintas sektor di Kota Kediri untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan	Pelibatan multipihak dalam menyelesaikan permasalahan kebencana lintas kewenangan	Penyelesaian penanganan Kawasan kumuh dan rawan bencana di sempadan sungai
Belum optimalnya ketangguhan Kota Kediri dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat, rendahnya kesiapsiagaan dan respons penanganan darurat serta belum adanya mekanisme pemulihan pasca	Meningkatnya ketangguhan Kota Kediri dalam menghadapi bencana	Peningkatan ketangguhan Kota Kediri dalam menghadapi bencana	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga Pendidikan. Edukasi dan kampanye publik tentang kebersihan lingkungan serta berwawasan Kesehatan	Peningkatan kapasitas Kawasan dalam menghadapi bencana, dan menciptakan lingkungan yang bersih serta berwawasan lingkungan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya	Mengoptimalkan fungsi forum multipihak dan mengintegrasikan agenda lintas sektor dalam	Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
bencana di Kota Kediri		penanggulangan bencana	perencanaan dan pelaksanaan kebijakan	penanggulangan bencana
	Terselenggaranya penanganan darurat di Kota Kediri pada saat terjadi bencana	Terlaksananya layanan pemerintahan pada saat tanggap darurat	Penguatan sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang cepat dan handal
	Tersedianya mekanisme pemulihan pasca bencana di Kota Kediri yang efektif	Terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	Menguatkan regulasi terkait pemulihan pasca bencana di Kota Kediri	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik (build back better)
Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim	Tersedianya infrastruktur yang memperhatikan aspek kebencanaan	Meningkatnya kualitas infrastuktur vital yang berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kualitas infrastuktur vital yang berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana
		Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana untuk	Pengaturan arah tataruang khususnya untuk

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyelenggaraan bangunan dan gedung.	meningkatkan efektivitas pengendalian penataan ruang.	permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana.
		Integrasi hasil kajian risiko bencana dalam RTRW dan RDTR		
		Terlaksananya analisis risiko bencana untuk setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi.	Penerapan analisis risiko bencana untuk setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi.	Terlaksananya analisis risiko bencana untuk setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi.
	Tersedianya infrastruktur pendukung ketahanan bencana	Terbangunnya infrastruktur drainase untuk perkotaan	Menyediakan drainase perkotaan dan sarana pendukungnya untuk mengurangi risiko banjir	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
		Terlaksananya normalisasi dan kapasitas aliran sungai.		
	Terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran	Memadukan penanganan dan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.	Terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat
	Terintegrasinya data Pembangunan yang mendukung pelaksanaan	Ketersediaan data yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk	Melakukan integrasi, sinkronisasi, sinergi data antar pelaku pembangunan.	Menjamin pelaksanaan integrasi,

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	SPM Sub Urusan Bencana di Kawasan Rawan Bencana	melaksanakan SPM Sub Urusan bencana		sinkronisasi, sinergi data antar pelaku pembangunan

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Tabel 4. 3 Program Penanggulangan Bencana RPB Kota Kediri 2026-2030

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Terintegrasinya regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat secara komprehensif	Program penanggulangan bencana	Jumlah regulasi yang disusun terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat
Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga pemerintahan di Kota Kediri	Terlaksananya koordinasi lintas sektor di Kota Kediri untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan		Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga di Kota Kediri (Terbentuknya forum risiko bencana Kota Kediri)
Tersedianya infrastuktur vital tahan bencana	Meningkatnya kualitas infrastuktur vital yang berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Program pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase infrastuktur yang telah berbasis pengurangan risiko bencana
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan dan gedung.	Program penataan bangunan gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Integrasi hasil kajian risiko bencana dalam RTRW dan RDTR.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah dokumen program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah sinkron dengan kajian risiko bencana
	Terlaksananya analisis risiko bencana untuk setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi	Program pelayanan penanaman modal	Persentase kegiatan pembangunan yang memiliki analisis risiko
Tersedianya infrastruktur pendukung ketahanan bencana	Terbangunnya infrastruktur drainase untuk perkot	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dengan kondisi optimal
	Terlaksananya normalisasi dan kapasitas aliran sungai.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Jumlah kebijakan terpadu dan infrastruktur pengendali banjir
Terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran	Program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah penerima manfaat untuk perlindungan sosial
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait kawasan rawan bencana
		Program pengembangan umkm	Usaha mikro pada daerah rawan bencana yang meningkat omsetnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait kawasan rawan bencana
		Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga dikawasan rawan bencana
Terintegrasinya data Pembangunan yang mendukung pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Ketersediaan data yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk melaksanakan SPM Sub Urusan bencana	Program penanggulangan bencana	Tersedianya sistem pendataan bencana daerah
			Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal
			Terselenggaranya komunikasi, informasi edukasi rawan bencana kepada masyarakat
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Integrasi dokumen rencana kegiatan penanggulangan bencana kedalam dokumen perencanaan OPD, dokumen perencanaan daerah dan dokumen teknis

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase pembangunan yang selaras dengan PB
		Program pengembangan perumahan	Persentase pembangunan perumahan yang selaras dengan PB
Meningkatnya ketangguhan Kota Kediri dalam menghadapi bencana	Peningkatan ketangguhan Kota Kediri dalam menghadapi bencana	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang teredukasi tentang kebersihan lingkungan
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut, layanan Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana
		Program pengembangan kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan
		Program penanggulangan bencana	Terbentuk satker SPAB Daerah 2. Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan dukungan penyelenggaraan SPAB

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase rumahsakit dan puskesmas tangguh dan aman bencana
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah desa tangguh dan aman bencana
			Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan
		Program penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana
		Program penanganan bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan sosialisasi
		Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan persampahan
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun
Terselenggaranya penanganan darurat di Kota Kediri pada saat terjadi bencana	Terlaksananya layanan pemerintahan pada saat tanggap darurat	Program penanggulangan bencana	Meningkatnya sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah
		Program penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat yang terlayani
		Program penanganan bencana	Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		dan penyelamatan non kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)
Tersedianya mekanisme pemulihan pasca bencana di Kota Kediri yang efektif	Terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	Program penanggulangan bencana	Adanya mekanisme pemulihan pasca bencana yang efektif
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Ketersediaan Energi
		Program pengembangan perumahan	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani
		Program kawasan permukiman	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah penanganan dampak bencana dan kejadian yang merugikan masyarakat

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Kediri. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah pokok yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini.

RAD memuat terkait sasaran, strategi dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Daerah disusun dengan mendorong keterlibatan multipihak (lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/organisasi perangkat vertikal).

Strategi penyelarasan program dan kegiatan RAD dengan program dan kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan mencantumkan kodefikasi dan nomenklatur. Setiap program dan kegiatan disandingkan dengan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Susunan RAD RPB kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rencana Aksi Daerah RPB Kota Kediri 2026-2030

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
ISU STRATEGIS I: Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana											
Terintegrasi regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat	Meningkatkan kualitas infrastruktur vital yang berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Mengharmoniskan regulasi tata ruang dan penanggulangan bencana,	Mewujudkan kawasan yang tahan terhadap bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.0 3.0 9	Persentase Kawasan rawan bencana angin puting beliung	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.0 3.0 9.2 .01	Jumlah bangunan yang tidak menggunakan konstruksi tahan bencana angin puting beliung	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	1.0 3.0 9.2 .01 00 11
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.1 1.0 4	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.1 1.0 4.2 .01	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola pada daerah rawan cuaca ekstrem seperti Pemantauan dan penebangan pohon yang rapuh dan berpotensi roboh, penerapan metode penjarangan pohon perindang	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.1 1.0 4.2 .01 00 04

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									dengan teknik potong meja untuk memecah konsentrasi kekuatan angin		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	X. XX .01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X. XX .01 .2. 09	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	X. XX .01 .2. 09. 00 10
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	X. XX .01 .2. 09. 00 11

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.0 3.0 3	Persentase infrastruktur dengan kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.0 3.0 3.2 .01	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.0 3.0 3.2 .01 .00 26
			Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.0 3.0 6	Persentase drainase dengan kondisi optimal	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.0 3.0 6.2 .01	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.0 3.0 6.2 .01 .00 12
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.0 3.0 2	Jumlah kebijakan terpadu dan infrastruktur pengendali banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	1.0 3.0 2.2 .01	Adanya kebijakan yang memperluas wewenang pemerintahtah	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	1.0 3.0 2.2 .01 .00 75

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
							Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		kota kediri dalam upaya penanganan bencana banjir diwilayah Sungai Berantas	Kewenangan Kabupaten/Kota	
										Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.0 3.0 2.2 .01 .00 26
										Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.0 3.0 2.2 .01 .00 80
										Normalisasi/restorasi sungai	1.0 3.0 2.2 .01 .00 93
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.0 3.0 2	Persentase infrastruktur penguat tebing	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1.0 3.0 2.2 .01	Jumlah pelaksanaan bangunan perkuatan tebing pada daerah rawan longsor	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.0 3.0 2.2 .01 .01 01

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Integrasi hasil kajian risiko bencana dalam RTRW dan RDTR	Melaksanakan kebijakan tataruang sejalan dengan kebijakan kajian risiko bencana yang telah ditetapkan	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan tataruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.0 3.1 2	Jumlah dokumen program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah sinkron dengan kajian risiko bencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	1.0 3.1 2.2 .03	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan sinkronisasi program penataan ruang	1.0 3.1 2.2 .03 05
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	1.0 3.1 2.2 .04	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi pelaksanaan penetapan ruang	1.0 3.1 2.2 .04 .00 04
	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait	Penguatan dan harmonisasi sistem regulasi tatakelola penanggulangan	Sinkronisasi dan harmonisasi sistem	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Jumlah regulasi yang disusun terkait penanggulangan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	1.0 5.0 3.2 .04	terintegrasinya regulasi penanggulangan an bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan an Bencana	1.0 5.0 3.2 .04

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
	dengan penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat secara komprehensif.	an bencana yang efektif dan efisien	tatakelola bencana			an bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat				Kabupaten/Kota	.0001
	Terlaksananya koordinasi lintas sektor di Kota Kediri untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan	Pelibatan multipihak dalam menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan	Penyelesaian penanganan Kawasan kumuh dan rawan bencana di sempadan sungai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga di Kota Kediri (Terbentuknya forum risiko bencana Kota Kediri)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.0 5.0 3.2 .04	Adanya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.0 5.0 3.2 .04 .00 03

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
	Jumlah hasil riset dan inovasi yang diterapkan dalam kebijakan publik	Memperkuat kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah Mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri agar hasil penelitian dapat diterapkan secara nyata	Membangun ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dengan dunia industri serta mendorong transfer teknologi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.0 5.0 2	Terintegrasinya perencanaan pembangunan dengan hasil-hasil penelitian	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.0 5.0 2.2 .04	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.0 5.0 2.2 .04 .00 04
	Terpenuhi sarana dan prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	Menguatkan regulasi terkait pemulihan pasca bencana di Kota Kediri	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik (build back better)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Adanya mekanisme pemulihan pasca bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.0 5.0 3.2 .04	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.0 5.0 3.2 .04 .00 10

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		
Terintegrasi ya regulasi terkait penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat secara komprehensif.	Penguatan dan harmonisasi sistem regulasi tatakelola Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang efektif dan efisien	Sinkronisasi dan harmonisasi sistem tatakelola bencana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.0 5.0 2	Adanya koordinasi terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.0 5.0 2.2 .01	Terintegrasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.0 5.0 2.2 .01 .00 03
ISU STRATEGIS 2: Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana											

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut, layanan Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	Menggunakan teknologi yang tepat dalam mendukung terselenggaranya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan SDM serta peralatan BPBD Kediri	Menyusun kebijakan yang lebih ketat terkait kesiapsiagaan bencana di Kota Kediri serta Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan darurat dan kesiapsiagaan bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki rencana kontinjensi, system peringatan dini, jalur evakuasi, SOP Penentuan status Tanggap Darurat, Penerapan Sistem Komando Operasi Daerah, SOP Pengerahan tim Penyelamatan dan pertolongan korban, SOP Perbaikan Daryrat serta Pengerahan bantuan pada	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.0 5.0 3.2 .02	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.0 5.0 3.2 .02 .00 09
									Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.0 5.0 3.2 .02 .00 23

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
						masyarakat terjauh yang jelas,			dalam 1 (satu) tahun		
									Kebijakan Penanganan darurat bencana	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Ko ta	1.0 5.0 3.2 .03 .00 07
									Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Ko ta	1.0 5.0 3.2 .02 .00 26

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Jumlah sistem peringatan dini tiap ancaman bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kot a	1.0 5.0 3.2 .02 .00 15
									Jumlah SOP yang tersedia untuk penanganan kondisi darurat antara lain: SOP Penentuan Status Tanggap Darurat, SOP Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana, SOP Perbaikan Darurat serta Pengerahan Bantuan pada masyarakat	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Ko ta	1.0 5.0 3.2 .03 .00 07

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									terjauh, SOP Pergerakan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban, SOP Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana,		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.0 5.0 2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.0 5.0 2.2 .01	Jumlah sistem peringatan dini tiap ancaman bencana dan infrastruktur jalur evakuasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.0 5.0 2.2 .01 .00 18
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	terlaksanakannya Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.0 5.0 3.2 .03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.0 5.0 3.2 .03 .00 12

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Kanupaten/ Kota		
									Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1.0 5.0 3.2 .03 .00 02
										Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.0 5.0 3.2 .03 .00 10
										Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.0 5.0 3.2 .03 .00 03
Terselenggaranya penanganan darurat di Kota Kediri pada saat	Terlaksananya layanan pemerintahan pada saat	Penguatan sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang cepat dan handal	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Meningkatnya sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.0 5.0 3.2 .03		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.0 5.0 3.2 .03 .00 09

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
terjadi bencana	tanggap darurat	melibatkan multi stakeholder				bencana daerah				Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENANGANA N BENCANA	1.0 6.0 6	Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.0 6.0 6.2 .01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.0 6.0 6.2 .01 .00 01
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	Penyediaan Sandang	1.0 6.0 6.2 .01 .00 02

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Kabupaten/ Kota		
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.0 6.0 6.2 .01 .00 04
									Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.0 6.0 6.2 .01 .00 05
									Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.0 6.0 6.2 .01

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Kabupaten/Kota		.00 07
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.0 5.0 4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.0 5.0 4.2 .01	Kegiatan dan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran pemukiman dan kebakaran lainnya (Menit)	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.0 5.0 4.2 .01 .00 01 1.0 5.0 4.2 .01 .00 02 1.0 5.0 4.2 .01 .00 03
Tersedianya mekanisme pemulihan pasca bencana di	Terpenuhi sarana dan prasarana penanganan darurat	Menguatkan regulasi terkait pemulihan pasca bencana di Kota Kediri	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.0 5.0 3	Adanya mekanisme pemulihan pasca bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.0 5.0 3.2 .04	Dokumen pemulihan pelayanan dasar pemerintah, Dokumen	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	1.0 5.0 3.2 .04 .00 15

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
Kota Kediri yang efektif	dan pemulihan sosial korban bencana		membangun kehidupan yang lebih baik (build back better)						mekanisme dan regulasi pemulihan aset penduduk terdampak bencana, Dokumen mekanisme dan regulasi pemulihan penghidupan masyarakat.	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
									Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.0 5.0 3.2 .04 .00 08

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		
									Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.0 5.0 3.2 .04 .00 10
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	1.0 2.0 2	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan Pra Fasilitas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.0 2.0 2.2 .02	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan Psc 119 Yes Yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.0 2.0 2.2 .02 .00 38

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
				MASYARAKAT		Pelayanan Kesehatan	Kabupaten/Kota		Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.0 9.0 3	Angka Ketersediaan Energi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.0 9.0 3.2 .01	Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan	Pemantauan Stok Pangan	2.0 9.0 3.2 .01 .00 11
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.0 4.0 2	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	1.0 4.0 2.2 .01	Jumlah data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.0 4.0 2.2 .01 .00 02

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
							Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.0 4.0 2.2 .01 .00 03
										Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.0 4.0 2.2 .01 .00 07
							Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.0 4.0 2.2 .02	Jumlah orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.0 4.0 2.2 .02 .00 01

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Bencana Kabupaten/Ko ta	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1.0 4.0 2.2 .02 .00 04
										Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	1.0 4.0 2.2 .02 .00 07
										Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1.0 4.0 2.2 .02 .00 06
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	1.0 4.0 2.2 .03	Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitas	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.0 4.0 2.2 .03 .00 01

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
							Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen laporan hasil pemeliharaan perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.0 4.0 2.2 .03 .00 06
ISU STRATEGIS 3: Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim											
Terintegrasi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran	Memadukan penanganan dan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.	Terintegrasi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.0 6.0 5	Jumlah penerima manfaat untuk perlindungan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.0 6.0 5.2 .02	Jumlah penerima manfaat untuk perlindungan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.0 6.0 5.2 .02 .00 08
										Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.0 6.0 5.2 .02 .00 04
										Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	1.0 6.0 5.2 .02 .00 09

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
										Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.0 6.0 5.2 .02 .00 10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.1 7.0 7	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait kawasan rawan bencana	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.1 7.0 7.2 .01 .00 14
										Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.1 7.0 7.2 .01 .00 05
										Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh	2.1 7.0 7.1 .01

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
										dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	.00 01
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.1 7.0 8	Usaha mikro pada daerah rawan bencana yang meningkat omsetnya.	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.1 7.0 8.1 .01	Jumlah UMKM yang pulih setelah terdampak bencana	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	2.1 7.0 8.1 .01 .00 05
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.0 1.0 3	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait kawasan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.0 1.0 3.2 .06	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan	7.0 1.0 3.2 .06 .00 08

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
						rawan bencana			Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.1 4.0 4	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga dikawasan rawan bencana	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.1 4.0 4.2 .01	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (persen)	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	2.1 4.0 4.2 .01 .00 23
										Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	2.1 4.0 4.2 .01 .00 21

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
										Keluarga Akseptor (UPPKA)	
Penataan kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	Peningkatan program peremajaan dan penataan kawasan kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.0 4.0 3	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.0 4.0 3.2 .02	Jumlah data perumahan dan permukiman kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.0 4.0 3.2 .02 .00 14
									Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	1.0 4.0 4.2 .01 .00 08
									Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.0 4.0 3.2 .03 .00 02

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.0 4.0 3.2 .02 .00 12
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.0 4.0 4	Jumlah penanganan dampak bencana dan kejadian yang merugikan masyarakat	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.0 4.0 4.2 .01	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1.0 4.0 4.2 .01 .00 06
									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap	1.0 4.0 4.2 .01 .00 07

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									pengecahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan	Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
											1.0 4.0 4.2 .01 .00 08 1.0 4.0 4.2 .01 .00 09

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Permukiman Kumuh Baru		
Mengoptimalkan penanganan persampahan di Kota Kediri	Kapasitas TPA dan volume pengelolaan sampah	- Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah	- Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di luar TPA (TPST, bank sampah) - Penguatan kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya - Kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.1 1.1 1	Persentase pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah	2.1 1.1 1.2 .01	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai	2.1 1.1 1.2 .01 .00 04 2.1 1.1 1.2 .01 .00 17

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
										dengan peraturan perundangan	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.1 1.1 1.2 .01 .00 05
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.0 3.0 4	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.0 3.0 4.2 .01	Jumlah sarana/prasarana persampahan di Kota Kediri	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.0 3.0 4.2 .01 .00 13
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.0 3.0 4.2 .01 .00 18

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
										Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	1.0 3.0 4.2 .01 .00 20
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim	Adanya program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan regulasi dan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim	Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.1 1.0 3	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.1 1.0 3.2 .01	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) untuk menurunkan emisi GRK	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.1 1.0 3.2 .01 .00 01
Terintegrasinya data pembangunan yang mendukung pelaksanaan SPM sub kebencanaan di kawasan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	- Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi SPM - Peningkatan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.0 3.0 2	Persentase pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi	Pengembangan Kompetensi ASN	5.0 3.0 2.2 .03	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan	5.0 3.0 2.2 .03 5.0 3.0 2.2 .03

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
rawan bencana			kinerja pemerintah							Fungsional ASN	.0012
	Ketersedian data yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk melaksanakan SPM Sub Urusan bencana	Melakukan integrasi, sinkronisasi, sinergi data antar pelaku pembangunan.	Menjamin pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, sinergi data antar pelaku pembangunan.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03	Tersedianya sistem pendataan bencana daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	adanya sistem yang terintegrasi dengan baik dalam pendataan penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04
						Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01	adanya dokumen pemutahiran kajian risiko bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.08
						Terselenggaranya komunikasi, informasi edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	1.05.03.2.01.07

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
									Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Ancaman Bencana)	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.0 1.0 2	Persentase Integrasi dokumen rencana kegiatan penanggulangan bencana kedalam dokumen perencanaan OPD, dokumen perencanaan daerah dan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.0 1.0 2.2 .01	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya termasuk dokumen rencana penanggulangan an bencana	5.0 1.0 2.2 .01 .00 02

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
						dokumen teknis			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.0 1.0 2.2 .01 .00 04
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.0 1.0 2.2 .03	Dokumen hasil monitoring pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.0 1.0 2.2 .03 .00 01
									keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.0 1.0 2.2 .03 .00 03
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	5.0 1.0 3	Persentase pembangunan yang selaras dengan PB	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	5.0 1.0 3.2 .03	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	5.0 1.0 3.2 .03

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			dan Kewilayahan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	.0007
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.0008
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02	Persentase pembangunan perumahan yang selaras dengan PB	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.06	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.03

BAB VI

PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

VI. 1 Pemanduan Para Pihak

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan komitmen para pihak yang didokumentasikan sebagai dasar pencapaian target ketangguhan di tingkat lokal dan secara bertingkat akan berkontribusi terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa sebagaimana terumuskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Pencapaian visi Indonesia Tangguh tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah.

Pemaduan para pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Pelibatan para pihak juga bermakna bahwa pemberdayaan merupakan prioritas dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat diposisikan sebagai subyek yang berdaya dan dapat menolong diri mereka sendiri. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah di Kota Kediri meliputi:

- a. Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB
- b. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB
- c. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki
- d. Memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB
- e. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan
- f. Memberikan dukungan pada pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan

bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.

- g. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tugas para pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Tugas Para Pihak Non-Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Stakeholder	Peran
Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil (termasuk FPRB, Ormas dan NGO/LSM)	• Mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana • Memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kota Kediri
Akademisi	• Mereproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. • Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. • Melakukan supervisi, menyelaraskan, serta memandu sepuhan ilmiah sekaligus memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB.
Lembaga Dunia Usaha	• Memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB
Media Massa	• Menyebarkan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana • Berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kota Kediri.

VI.2 Pemanduan ke Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan sinkronisasi waktu penyusunan yang tidak bersamaan perlu dilakukan advokasi

dengan menunjukkan kontribusi perencanaan yang telah disusun terhadap perencanaan lainnya sebagai bentuk pemaduan dengan menunjukkan kontribusi rencana Penanggulangan Bencana terhadap dokumen perencanaan lainnya. Tabel atau matriks pemanduan sasaran RPB terhadap sasaran dalam perencanaan pembangunan lainnya termuat pada Tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Matriks Pemanduan Sasaran RPB terhadap Sasaran dalam Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sasaran	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kota Kediri
Terintegrasinya regulasi terkait penanggulangan bencana dan penanganan kejadian yang merugikan masyarakat	RIPB	• Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.	• Penataan sistem dasar penanggulangan bencana • Penegakan peraturan daerah kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota
	RPB Provinsi Jawa Timur 2023-2027	• Penyusunan legislasi penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur	
	RPD Kota Kediri 2025-2026	• Program penanggulangan bencana • Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
Terintegrasinya koordinasi lintas sektor/lembaga pemerintahan di Kota Kediri	RIPB	• Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.	• Korrdinasi kegiatan pemberdayaan desa • Penegakan peraturan daerah kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota
	RPB Provinsi Jawa Timur 2023-2027	• Pemantapan koordinasi/ Kerjasama antar pelaku penanggulangan bencana Jawa Timur • Peningkatan diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan edukasi kebencanaan bagi	

Sasaran	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kota Kediri
		pentahelix non pemerintah Jawa Timur • Pemberdayaan pemangku kepentingan pentahelix non-pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana Jawa Timur	
	RPD Kota Kediri 2025-2026	• Program kepegawaian daerah • Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota • Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik • Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	
Tersedianya infrastruktur yang memperhatikan aspek kebencanaan	RIPB	• Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.	• Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum • Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	RPB Provinsi Jawa Timur 2023-2027	• Penguatan dan pemeliharaan infrastruktur kritis di daerah rawan bencana • Penguatan bangunan fasilitas sektor publik dan sektor privat di daerah rawan bencana	
	RPD Kota Kediri 2025-2026	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem air Limbah • Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

Sasaran	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kota Kediri
Mengoptimalkan penanganan persampahan di Kota Kediri	RPD Kota Kediri	• Program Pengelolaan Persampahan	• Pengelolaan sampah • Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota
Terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan di wilayah rawan bencana	RPD Kota Kediri 2025-2026	• Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja	• Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota • Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah • Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terintegrasinya data Pembangunan yang mendukung pelaksanaan SPM Sub Kebencanaan di Kawasan Rawan Bencana	RPB Jawa Timur	• Perencanaan, penetapan, pengembangan kawasan yang memperhatikan faktor risiko bencana	• Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten atau kota • Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	RPD Kota Kediri	• Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

Sasaran	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kota Kediri
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta berwawasan Kesehatan	Rpb jatim	- Perencanaan, penetapan, pengembangan kawasan yang memperhatikan faktor risiko bencana - Pengendalian kegiatan permukiman dan pemanfaatan lahan budidaya di daerah rawan bencana	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten atau kota
	RPD Kota Kediri 2025-2026	- Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Rpb jatim	- Pengoptimalan SOP dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat yang efektif - Pengoptimalan sistem informasi dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat yang efektif	- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten atau kota
	RPD Kota Kediri 2025-2026	- Program penanggulangan bencana - Program penanganan bencana	
Meningkatkan respons penanganan darurat bencana	Ripb	Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten atau kota dalam rangka stabilisasi
	RPD Kota Kediri 2025-2026	- Program penanggulangan bencana - Program penanganan bencana	

Sasaran	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kota Kediri
			pasokan dan harga pangan
Terciptanya mekanisme pemulihan pasca bencana di Kota Kediri yang efektif	Ripb	• Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.	• Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten atau kota • Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten atau kota • Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten atau kota
	Rpb jatim	• Pengoptimalan SOP dalam pemulihan bencana yang efektif • Pengoptimalan SOP dalam pemulihan bencana yang efektif	
	RPD Kota Kediri 2025-2026	• Program penanggulangan bencana • Program penanganan bencana	

Metode analisis pengarusutamakan atau pepaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemanduan dengan mengkaji isu atau kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proes ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2: Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa

3. Langkah 3: Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4: Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5: Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
6. Langkah 6: Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya
7. Langkah 7: Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
8. Langkah 8: Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
9. Langkah 9: Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
10. Langkah 10: Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tesebut dapat disajikan dalam sebuah matriks atau tabel untuk memudahkan proses identifikasi dan analisis. Pada Tabel 6.3 disajikan beberapa contoh penggunaan metode analisis pemduan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah.

Tabel 6. 3 Matriks Analisis Pemanduan Pengurangan Risiko Bencana

LANG KAH 1	LANG KAH 2	LANG KAH 3	LANG KAH 4	LANG KAH 5	LANG KAH 6	LANG KAH 7	LANG KAH 8	LANG KAH 9	LANG KAH 10
Kegiat an yang	Data Pendu kung	Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		

akan dianalisis		Faktor Gap	Sebab Gap Internal	Sebab Gap eksternal	Re-formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator Kinerja RPB

VI.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kediri dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di dalamnya terintegrasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Renaksi PRB), pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan RPB.

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian RPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, khususnya yang terkait dengan RPB. Tabel 6.4 menunjukkan kerangka pemantauan dan evaluasi dokumen RPB.

Tabel 6. 4 Kerangka Pemanduan dan Evaluasi RPB

Waktu	Materi/ Pemantauan Evaluasi	Kriteria/ Indikator Pemantauan/ Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian keluaran		Forum lintas sektor dan forum RPB
Per Tahun	Pemanduan para pihak		

	Pemanduan perencanaan lainnya		Forum lintas sektor dan forum RPB
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

Sumber: BNPB, 2021

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:

11. Tujuan RPB
12. Sasaran RPB
13. Program pendukung
14. Kegiatan
15. Sub Kegiatan

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan format tabel seperti pada Tabel 6.5 dan Tabel 6.5.

Tabel 6. 5 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Target Tahun	Capaian Tahun					Catatan
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 6. 6 Contoh Format Rencana Pemantauan per-Semester

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksanaan

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan pendukung

RPB, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan menyampaikannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Kediri.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (*result oriented government*). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian outcome dalam RPB, dan perbaikan pelayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi.

Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Kediri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kota Kediri melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk desk timbal balik setiap semester. Pelaksanaan desk timbal balik pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Dalam hal diperlukan, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan Perangkat Daerah lain di Pemda Kota Kediri yang membidangi perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain. Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan

sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB dapat melibatkan instansi/lembaga lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Pelayanan publik
- c. Kearsipan
- d. Lembaga ombudsma

BAB VII

PENUTUP

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat.

Penyusunan RPB Kota Kediri melibatkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Walikota yang akan mengikat *stakeholders* kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Kediri. RPB Kota Kediri dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kediri yang akan disinkronisasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Kediri dan Rencana strategis penanggulangan bencana OPD.

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP 19840804 201001 2 042

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
KEDIRI 2026-2030

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2026-2030

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
ISU STRATEGIS I: Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana																										
Terintegr asinya regulasi terkait penanggu langan bencana dan penangan an kejadian yang merugika n masyarak at	Mening katnya kualitas infrastru ktur vital yang berbasi s pengur angan risiko bencana dan adaptasi peruba han iklim.	Meng harm onisk an regula si tata ruang dan penan ggula ngan benca na,	Mewuju dkan kawasa n yang tahan terhada p bencana	PROG RAM PENA TAAN BANG UNAN DAN LING KUNG ANNY A	1.03. 09	Persent ase Kawasa n rawan bencan a angin puting beliung	Penye lengg araan Penat aan Bang unan dan Lingk unga nnya di Daera h Kabu paten /Kota	1.03 .09. 2.01	Juml ah bangu nan yang tidak meng gunak an konst ruksi tahan bencana angin putin g beliung	Penataa n Bangun an dan Lingku ngan di Daerah Kabupa ten/Kot a	1.03 .09. 2.01 .001 1	100	100	100	100	100	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	Keluraha n Rawan Bencana Cuaca Ekstrem	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB, RPB JATIM, RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PROG RAM PENG ELOL AAN KEAN EKAR AGA MAN HAYA TI (KEH ATI)	2.11. 04	Jumlah Ruang Terbuk a Hijau (RTH) yang dikelola	Penge lolaan Keane karag aman Hayat i Kabu paten /Kota	2.11 .04. 2.01	Ruan g Terbu ka Hijau (RTH) yang Dikel ola pada daera h rawan cuaca ekste m sepert i Pema ntaua n dan peneb angan pohon yang rapuh dan berpo tensi roboh , pener apan metod e penja ranga n	Pengelo laan Ruang Terbuk a Hijau (RTH)	2.11 .04. 2.01 .000 4	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	Keluraha n Rawan Bencana Cuaca Ekstrem	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									pohon perin dang denga n tekni k poton g meja untuk meme cah konse ntrasi kekua tan angin																	
				PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN DAER AH KABU PATE N/KO TA	X.XX. 01	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi	Pemel ihara an Baran g Milik Daera h Penu njang Urusa n Pemer intah an Daera h	X.X X.0 1.2. 09	Juml ah Saran a dan Prasa rana Gedu ng Kanto r atau Bang unan Lainn ya yang Dipeli hara/ Direh abilita si	Pemelih araan/r ehabilit asi sarana dan prasara na gedung kantor dan bangun an lainnya	X.X X.0 1.2. 09.0 010	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Keluraha n Rawan Bencana Cuaca Ekstrem	B P B D D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									Juml ah Saran a dan Prasa rana Pend ukun g Gedu ng Kanto r atau Bang unan Lainn ya yang Dipeli hara/ Direh abilita si	Pemelih araan/r ehabilit asi sarana dan prasara na penduk ung gedung kantor dan bangun an lainnya	X.X X.0 1.2. 09.0 011	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Keluraha n Rawan Bencana Cuaca Ekstrem	B P B D D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
				PROG RAM PENG ELOL AAN DAN PENG EMBA NGAN SISTE M	1.03. 03	Persent ase infrastr uktur dengan kondisi baik	Penge lolaan dan Penge mban gan Siste m Penye diaan Air	1.03 .03. 2.01	Kapas itas Siste m Penye diaan Air Minu m (SPAM)	Peningk atan Sistem Penyedi aan Air Minum (SPAM) Jaringa n Perpipa an	1.03 .03. 2.01 .002 6	10	10	10	10	10	500	500	500	500	500	Keluraha n Rawan Bencana Kekering an	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PENY EDIA AN AIR MINU M			Minu m (SPA M) di Daera h Kabu paten /Kota		Jarin gan Perpi paan yang diting katka n	Optimal isasi Sistem Penyedi aan Air Minum (SPAM) Jaringa n Perpipa an	1.03 .03. 2.01 .003 1	10	10	10	10	10	500	500	500	500	500		D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
			Mewuju dkan infrastr uktur yang berkual itas dan berkela njutan	PROG RAM PENG ELOL AAN DAN PENG EMBA NGAN SISTE M DRAI NASE	1.03. 06	Persent ase drainas e dengan kondisi optimal	Penge lolaan dan Penge mban gan Siste m Drain ase yang Terhu bung Langs ung denga n Sung ai dalam Daera h Kabu paten /Kota	1.03 .06. 2.01	Panja ng drain ase tidak tersu mbat pemb uanga n aliran air (Km)	Pemban gunan Sistem Drainas e Lingku ngan	1.03 .06. 2.01 .001 2	4	4	4	4	4	190 0	190 0	190 0	190 0	190 0	Keluraha n Rawan Bencana Banjir (Kel. Balowerti Kel. Banjaran Kel.	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Rehabil itasi Sistem Drainas e Perkota an	1.03 .06. 2.01 .002 8	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	270	270	270	270	270	Dandang an Kel. Jagalan Kel. Kaliombo Kel. Kampung dalem Kel. Kemasan Kel. Manisren ggo Kel. Ngadirejo Kel. Ngronggo	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
																						Kel. Pakelan Kel. Pocanan Kel. Rejomuly o Kel. Ringinan om Kel. Semampi r Kel. Setonoge dong Kel. Setonopa nde Kel. Bandar Kidul Kel. Bandar Lor Kel. Banjarml ati Kel. Bujel Kel. Campurej o Kel. Dermo Kel. Gayam Kel. Lirboyo			

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
																					Kel. Mojoroto Kel. Mrican Kel. Ngampel Kel. Pojok Kel. Sukoram e Kel. Tamanan Kel. Banaran Kel. Jamsaren Kel. Pakunde n Kel. Pesantre n Kel. Singoneg aran Kel. Tosaren)				
				PROG RAM PENG ELOL AAN SUM BER DAYA AIR (SDA)	1.03. 02	Jumlah kebijak an terpadu dan infrastr uktur pengen dali banjir	Penge lolaan SDA dan Bang unan Penga man Panta i pada Wilay	1.03 .02. 2.01	Adan nya kebij akan yang memp erluas wewe nang pemer intaht	Pembin aan dan Pember dayaan Kelemb agaan Pengelo laan SDA Kewena	1.03 .02. 2.01 .007 5	50	50	50	50	50	10	10	10	10	10	Kota Kediri	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
							ah Sung ai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kabu paten /K ota		ah kota kediri dalam upaya penan ganan benca na banjir diwila yah Sung ai Beran tas	ngan Kabupa ten/Kot a																
										Rehabil itasi Pintu Air/Ben dung Pengen dali Banjir	1.03 .02. 2.01 .002 6	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Keluraha n Rawan Bencana Banjir & Longsor (Kel. Balowerti Kel. Banjaran Kel. Dandang an Kel. Jagalan Kel. Kaliombo Kel. Kampung dalem Kel. Kemasan Kel. Manisren ggo Kel. Ngadirejo Kel. Ngronggo Kel. Pakelan	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
										Operasi dan Pemelih araan Tanggul dan Tebing Sungai	1.03 .02. 2.01 .008 0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	300	300	300	300	300		D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
										Normali sasi/re storasi sungai	1.03 .02. 2.01 .009 3	50	50	50	50	50	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0		D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
																						Kel. Pocanan Kel. Rejomulyo Kel. Ringinanom Kel. Semampir Kel. Setonogedong Kel. Setonopande Kel. Bandar Kidul Kel. Bandar Lor Kel. Banjarmlati Kel. Bujel Kel. Campurejo Kel. Dermo Kel. Gayam Kel. Lirboyo Kel. Mojoroto			

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
																						Kel. Mrican Kel. Ngampel Kel. Pojok Kel. Sukoram e Kel. Tamanan Kel. Banaran Kel. Jamsaren Kel. Pakunde n Kel. Pesantre n Kel. Singoneg aran Kel. Tosaren)			
				PROG RAM PENG ELOL AAN SUM BER DAYA AIR (SDA)	1.03. 02	Persen tase infrastu ktur pengua t tebing	Penge lolaan SDA dan Bang unan Penga man Panta i pada Wilay ah Sung	1.03 .02. 2.01	Juml ah pelak sanaa n bangu nan perku atan tebing pada daera h	Peningk atan Bangun an Perkuat an Tebing	1.03 .02. 2.01 .010 1	1	1	1	1	1	500	500	500	500		Keluraha n Rawan Bencana Tanah Longsor di lereng Gunung Klotok (Kel. Pojok Kel. Sukoram e)	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
							ai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kabu paten /Kota		rawan longs or																	
	Integra si hasil kajian risiko bencan a dalam RTRW dan RDTR	Melak sanak an kebija kan tataru ang sejala n denga n kebija kan kajian risiko benca na yang telah diteta pkan	Sinkron isasi dan harmon isasi kebijak an tatarua ng	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PENA TAAN RUAN G	1.03. 12	Jumlah dokume n progra m pemanf aatan dan pengen dalian pemanf aatan ruang yang telah sinkron dengan kajian risiko bencan a	Koord inasi dan Sinkr onisa si Pema nfaat an Ruan g Kabu paten /Kota	1.03 .12. 2.03	Juml ah doku men sinkr onisa si Pema nfaat an progr am pema nfaat an ruang	Pelaksa naan sinkron isasi progra m penataa n ruang	1.03 .12. 2.03 .000 5	I dok	I dok	I dok	I dok	I dok	20	20	20	20	20	Kota Kediri	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
							Koord inasi dan Sinkr onisa si Penge	1.03 .12. 2.04	Pelak sanaa n Koord inasi Pelak sanaa	Koordin asi pelaksa naan penetap an ruang	1.03 .12. 2.04 .000 4	I dok	I dok	I dok	I dok	I dok	20	20	20	20	20	Kota Kediri	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
																	(Juta Rupiah)										
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29						
							ndalia n Pema nfaat an ru ang da era h kabu paten /kota		n Penat aan Ru an g																	Kota Kediri	
	Tersedi anya re gulasi dan ke bijak an ter kait dengan penang gulang a n be ncan a dan penang gulan an ke jadi an yang merugi kan ma syar akat se cara k ompre hensif.	Pengu atan dan harm onisa si siste m regula si tata ke lola penan ggulan an ben cana yang efektif dan ef esie n	Sinkron isasi dan harmoni isasi sistem tatakelo la bencana a	PROG RAM PENAN GGULAN BENC ANA	1.05. 03	Jumlah regulasi yang disu n terkait penang gulan a n be ncan a dan penang an an kejadi an yang merugi kan ma syar akat	Penat aan Siste m Dasar Penan ggulan an Ben cana	1.05 .03. 2.04	terint egrasi nya re gula si penan ggulan an ben cana	Penyus unan Re gulas i Penan gulan a n Ben cana Kabupa ten/Kot a	1.05 .03. 2.04 .000 1	1 dok						20						Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
	Terlaksananya koordinasi lintas sektor di Kota Kediri untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan	Pelibatan multi pihak dalam menyelesaikan permasalahan kebencanaan lintas kewenangan	Penyelesaian penanganan Kawasan kumuh dan rawan bencana di sempadan sungai	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.05.03	Terintegrasi koordinasi lintas sektor/ lembaga di Kota Kediri (Terbentuknya forum risiko bencana Kota Kediri)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Adanya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0003	1 dok					20					Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
	Jumlah hasil riset dan inovasi yang diterapkan dalam kebijakan publik	Mempertukarkan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah Mendukung kerja sama	Membangun ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dengan dunia industri serta mendorong transfer teknologi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02	Terintegrasi perencanaan pembangunan dengan hasil-hasil penelitian	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbahannya	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbahannya	5.05.02.2.04.0004	5 penelitian	5 penelitian	5 penelitian	5 penelitian	5 penelitian	25	25	25	25	25	Kota Kediri	B a r e n l i t b a n g		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
		antar a pergu ruan tinggi, lemba ga riset, dan sektor indus tri agar hasil peneli tian dapat ditera pkan secar a nyata																								
	Terpen uhinya sarana dan prasara na penang anan darurat dan pemuli han sosial korban bencana	Meng uatka n regula si terkai t pemul ihan pasca benca na di Kota Kediri	Percepa tan pemuli han daerah dan masyar akat terdam pak bencana a untuk memba ngun kehidu pan	PROG RAM PENA NGG ULAN GAN BENC ANA	1.05. 03	Adanya mekani sme pemuli han pasca bencana yang efektif	Pena taan Siste m Dasar Penan ggula ngan Benca na	1.05 .03. 2.04	Juml ah penye lesaia n kegiat an pasca benca na di semu a sektor sesua i berda	Koordin asi penang anan Pascabe ncana Kabupa ten/Kota	1.05 .03. 2.04 .001 0	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
																	(Juta Rupiah)										
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29						
			yang lebih baik (build back better)						sark an Renca na Reha bilitas i dan Rekon truksi Pasca benca na (R3P) Kabu paten /Kota yang dilega lkan																		
Terintegrasi asinya regulasi terkait penyelen ggaraan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindun gan Masyarak at	Tersedi anya regulasi dan kebijak an terkait dengan penyele nggaraa n Ketentr aman dan Ketertib an Umum serta Perlind	Pengu atan dan harm onisa si siste m regula si tatake lola Penye lengg araan Keten trama n dan Ketert	Sinkron isasi dan harmon isasi sistem tatakelo la bencan a	PROG RAM PENI NGKA TAN KETE NTER AMAN DAN KETE RTIB AN UMU M	1.05. 02	Adanya koordin asi terkait ketente raman, ketertib an umum dan perlind ungan masyar akat	Penan gangan Gang guan Keten teram an dan Ketert iban Umu m dalam 1 (Satu) Daera h Kabu	1.05 .02. 2.01	Terint egrasi nya penye lengg araan ketent rama n dan ketert iban umu m serta perlin dunga n masy	Koordin asi Penyele nggaraa n Ketentr aman dan Ketertib an Umum serta Perlind ungan Masyar akat Tingkat Kabupa	1.05 .02. 2.01 .000 3	1 dok						20						Kota Kediri	S AT P O L PP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikat or Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
	ungan Masyarakat secara komprehensif.	iban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang efektif dan efisien					paten /Kota		araka t	ten/Kota															
ISU STRATEGIS 2: Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana																									
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan	Menggunakan teknologi yang tepat dalam mendukung terselenggaranya kesiapsiagaan	Menyusun kebijakan yang ketat terkait kesiapsiagaan bencana di Kota Kediri serta Mengalokasikan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.05.03	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki rencana kontinjensi, system peringatan dini, jalur	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana	Penyusunan Rencana Kontinjensi	1.05.03.2.02.0009	5	6	6	6	6	150	180	180	180	180	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
	Berlanj ut, layanan Peningk atan Kapasit as Personil dalam Operasi Tangga p Darurat Bencan a	aan masy araka t dan pemer intah, memi ngkat kan SDM serta perala tan BPBD Kediri	n anggara n yang cukup untuk penang anan darurat dan kesiaps iagaan bencan a.			evakua si, SOP Penent uan status Tangga p Darurat , Penerap an Sistem Koman do Operasi Daerur at, SOP Penger ahan tim Penyela matan dan pertolo ngan korban, SOP Perbaik an Daryrat serta Penger ahan bantua n pada masyar akat terjauh			na) samp ai denga n dinyat akan sah/l egal paling lama dalam 1 (satu) tahun																
									Juml ah doku men Renca na Penan ggula ngan Kedar urata n Benca na (RPK B) Kabu paten /Kota samp ai denga n	Penyus unan Rencan a Penang gulanga n Kedaru ratan Bencan a	1.05 .03. 2.02 .002 3	5	6	6	6	6	150	180	180	180	180	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
						yang jelas,			dinyat akan sah/l egal paling lama dalam 1 (satu) tahun																	
									Kebija kan Penan ganan darur at benca na	Penyus unan Rencan a Operasi Kedaru ratan Bencan a Kabupa ten/Kot a	1.05 .03. 2.03 .000 7	1 Dok					100						Kota Kediri	B AP P E D A B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
									Terse diany a layan an pusat penge ndalia n opera si (pusd alops) denga n Makl	Pengen dalian Operasi dan Penyedi aan Sarana Prasara na Kesiaps iagaan Terhad ap Bencan a Kabupa	1.05 .03. 2.02 .002 6	78%	80%	82%	84%	86%	50	50	50	50	50	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									umat Pelay anan yang sah dan legal serta duku ngan penye diaan saran a prasa rana kesia psiag aan terha dap benca na	ten/Kot a															
									Juml ah siste m pering atan dini tiap anca man benca na	Penyedi aan Peralat an Perlind ungan dan Kesiaps iagaan Terhad ap Bencan a kabupa	1.05 .03. 2.02 .001 5	5	6	6	6	6	500	600	600	600	600	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
										ten/kot a																
									Juml ah SOP yang tersed ia untuk penan ganan kondi si darur at antar a lain: SOP Penen tuan Statu s Tangg ap Darur at, SOP Pengh entia n Statu s Tangg	Penyus unan Rencan a Operasi Kedaru ratan Bencan a Kabupa ten/Kot a	1.05 .03. 2.03 .000 7	3	3						100	100				Kota Kediri	B P B D	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

[illegible]

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									Cepat ke Lokas i Benca na,																	
				PROG RAM PENI NGKA TAN KETE NTER AMAN DAN KETE RTIB AN UMU M	1.05. 02		Penan ganan Gang guan Keten teram an dan Ketert iban Umum dalam 1 (Satu) Daera h Kabu paten /Kota	1.05 .02. 2.01	Juml ah siste m pering atan dini tiap anca man benca na dan infras truktu r jalur evaku asi	Pengad aan dan Pemelih araan Sarana dan Prasara na Ketentr aman dan Ketertib an Umum	1.05 .02. 2.01 .001 8	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	Kota Kediri	S AT P O L PP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
				PROG RAM PENA NGG ULAN GAN BENC ANA	1.05. 03	terlaksa nakann ya Penerap an Sistem Koman do Operasi Darurat	Pelay anan Penye lamat an dan Evak uasi Korba n	1.05 .03. 2.03	Juml ah Lapor an Pelak sanaa n Aktiva si Siste m	Aktivasi Sistem Koman do Penang sanan Darurat Bencan a	1.05 .03. 2.03 .001 2	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
							Benca na		Koma ndo Penan ganan Darur at Benca na Kanu paten /Kota																	
									Caku pan warga negar a yang memp eroleh layan an	Respon Cepat Darurat Bencan a Kabupa ten/Kot a	1.05 .03. 2.03 .000 2	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									an penye lamat an dan evaku asi korba n benca na	Respon Cepat Bencan a Non Alam Epidem i/Waba h Penyaki t	1.05 .03. 2.03 .001 0	1	1	1	1	1						Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
										Pencari an, Pertolo ngan dan Evakua si	1.05 .03. 2.03 .000 3	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD	

Sasaran	Indikat or Sasaran (Dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikat or Program	Kegiatan	Nomenklatur Program	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Korban Bencana Kabupaten/Kota															Kota Kediri
Terselenggaranya penanganan darurat di Kota Kediri pada saat terjadi bencana	Terlaksananya layanan pemerintahan pada saat tanggap darurat	Penguatan sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang cepat dan handal	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.05.03	Meningkatnya sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.000.9	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	30	30	30	30	30	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06	Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.000.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DIN SOSD P3 AP 2 K B B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									(Peng ungsi an) Kewe nanga n Kabu paten /Kota																
									Juml ah Orang yang Mend apatk an Pakai an dan Kelen gkapa n Lainn ya yang Terse dia pada Masa Tangg ap Darur at (Peng ungsi an) dan Pasca	Penyedi aan Sandan g	1.06 .06. 2.01 .000 2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapka n bencana	DI N S O S D P3 AP 2 K B B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									Benca na Kewe nanga n Kabu paten /Kota																	
									Juml ah Orang yang Mend apatk an Penan ganan Khus us bagi Kelom pok Renta n Kewe nanga n Kabu paten /Kota	Penang anan Khusus bagi Kelomp ok Rentan	1.06 .06. 2.01 .000 4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapka n bencana	DI N S O S D P3 AP 2 K B B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									Juml ah Korba n Benca na yang Mend	Pelayan an Dukun gan Psikoso sial	1.06 .06. 2.01 .000 5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapka n bencana	DI N S O S D P3 AP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									apatk an Layan an Duku ngan Psiko sosial Kewe nanga n Kabu paten /Kota													2 K B B P B D		Kota Kediri	
									Juml ah Temp at Pengu ngsia n Kewe nanga n Kabu paten /Kota	Penyedi aan Tempat Penamp ungan Pengun gsi	1.06 .06. 2.01 .000 7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapka n bencana	DI N S O S D P3 AP 2 K B B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
				PROG RAM PENC EGAH AN, PENA NGG ULAN GAN,	1.05. 04	Jumlah Warga Negara yang mempe roleh layanan penyela matan	Pence gahan , Penge ndalia n, Pema dama n,	1.05 .04. 2.01	Kegiat an dan Wakt u tangg ap (respo nse	Pencega han Kebaka ran dalam Daerah Kabupa ten/Kot a	1.05 .04. 2.01 .000 1	280	280	280	280	280						Kota Kediri	D A M K A R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PENY ELAM ATAN KEBA KARA N DAN PENY ELAM ATAN NON KEBA KARA N		dan Evakua si korban kebaka ran (Persen)	Penye lamat an, dan Penan ganan Baha n Berba haya dan Berac un Kebak aran dalam Daera h Kabu paten /Kota		time) penan ganan kebak aran pemu kima n dan kebak aran lainny a (Menit)	Pemada man dan Pengen dalian Kebaka ran dalam Daerah Kabupa ten/Kot a	1.05 .04. 2.01 .000 2	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	Kota Kediri	D A M K A R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Penyela matan dan Evakua si Korban Kebaka ran dan Non Kebaka ran	1.05 .04. 2.01 .000 3	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	Kota Kediri	D A M K A R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
Tersedian ya mekanis me pemulih an pas ca benc ana di Kota Kediri yang efektif	Terpen uhinya sarana dan pr asara na pen angan darurat dan pem ulihan sosial korban	Meng uatka n regula si terkait pemul ihan pas ca benc ana di Kota Kediri	Percepa tan pem ulihan daerah dan mas yarakat terdam pak benc ana untu k memba ngun ke hidu	PROG RAM PENA NGG ULAN GAN BENC ANA	1.05. 03	Adanya mekani sme pem ulihan pasca bencan a yang efektif	Pena taan Siste m Dasar Penan ggulan Bencana	1.05 .03. 2.04	Doku men pem ulihan pelay anan da sar pem erintah, Doku men meka nisme dan regula	Penyus unan Ka jian Ke butuhan Pascabe ncana (JITUPA SNA) dan Rencan a Rehabi litasi dan	1.05 .03. 2.04 .001 5	3					210					Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
	bencan a		pan yang lebih baik (build back better)						si pemul ihan aset pend uduk terda mpak benca na, Doku men meka nisme dan regula si pemul ihan pengh idupa n masy araka t.	Rekontr uksi Pascabe ncana (R3P) Kab/Ko ta															
									Juml ah Apara tur BPBD Kabu paten /Kota dan lintas peran gkat daera	Bimbin gan Teknis Pasca Bencan a Kabupa ten/Kot a	1.05 .03. 2.04 .000 .000 8	40	40	40	40	40	200	200	200	200	200	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									na (R3P)																	
									Juml ah penye lesaia n kegiat an pasca benca na di semu a sektor sesua i berda sarka n Renca na Reha bilitas i dan Rekon truksi Pasca benca na (R3P) Kabu paten	Koordin asi penang anan Pascabe ncana Kabupa ten/Kota	1.05 .03. 2.04 .001 0	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									/Kota yang dilega lkan																
				PROG RAM PEME NUHA N UPAY A KESE HATA N PERO RANG AN DAN UPAY A KESE HATA N MASY ARAK AT	1.02. 02	Persent ase Penang anan Kasus Kegawa tdarura tan Kesehat an Pra Fasilita s Pelayan an Kesehat an	Peny ediaa n Layan an Keseh atan untuk UKM dan UKP Rujuk an Tingk at Daera h Kabu paten /Kota	1.02 .02. 2.02	Juml ah Lapor an Hasil Opera sional Pelay anan Psc 119 Yes Yang Terint egrasi Deng an Ruma h Sakit Dala m Satu Siste m Penan gana n Gawa t Darur	Penyedi aan dan Pengelo laan Sistem Penang anan Gawat Darurat Terpad u (SPGDT)	1.02 .02. 2.02 .003 8	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	1	1	1	1	1	Kota Kediri	DI N K E S		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									at Terpa du (Spgd t)																	
				PROG RAM PENI NGKA TAN DIVE RSIFI KASI DAN KETA HANA N PANG AN MASY ARAK AT	2.09. 03	Angka Keterse diaa n Energi	Penye diaan dan Penya luran Panga n Pokok atau Panga n Lainn ya sesua i denga n Kebut uhan Daera h Kabu paten /Kota dalam rangk a Stabil isasi Pasok an	2.09 .03. 2.01	Juml ah Lapor an Infor masi Ketah anan Panga n	Pemant auan Stok Pangan	2.09 .03. 2.01 .001 1	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	10 Lap ora n	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D K PP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
							dan Harga Panga n																		
				PROG RAM PENG EMBA NGAN PERU MAH AN	1.04. 02	Jumlah rumah terkena dampak bencan a dan relokasi yang tertang ani	Penda taan Penye diaan dan Reha bilitas i Ruma h Korba n Benca na Kejadi an Sebel umny a yang Belu m Terta ngani	1.04 .02. 2.01	Juml ah data Ruma h Korba n Benca na Kejadi an Sebel umny a yang Belu m Terta ngani	Identifi kasi Lahan- Lahan Potensi al sebagai Lokasi Relokas i Peruma han	1.04 .02. 2.01 .000 2	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
							Benca na atau Relok asi Progr am Kabu paten /Kota			Pengum pulan Data Rumah Korban Bencan a Kejadia n Sebelu mnya yang Belum Tertang ani	1.04 .02. 2.01 .000 3	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Identifi kasi Peruma han di Lokasi yang Berpote nsi Terkena Relokas i Progra m Kabupa ten/Kot a	1.04 .02. 2.01 .000 7	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Wilayah Terdamp ak Bencana	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
							Sosial isasi dan Persia pan Penye diaan dan Reha bilitas i Ruma h Korba n Benca na atau Relok	1.04 .02. 2.02	Juml ah orang /Suk arela wan yang Mengi kuti Sosial isasi Stand ar Tekni s Penye diaan dan Reha	Sosialis asi Standar Teknis Penyedi aan dan Rehabil itasi Rumah kepada Masyar akat/S ukarela wan Tangga p Bencan a	1.04 .02. 2.02 .000 1	100 ora ng	200 ora ng	300 ora ng	400 ora ng	500 ora ng	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
							asi Progr am Kabup aten /Kota		bilitas i Ruma h Korba n Benca na Kabup aten /Kota	Pemben tukan dan Pelatiha n Tim Satgas, Tim Pendam ping dan Fasilita tor	1.04 .02. 2.02 .000 4	100 ora ng	200 ora ng	300 ora ng	400 ora ng	500 ora ng	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Rembu g Warga untuk Menent ukan Calon Peneri ma Rumah bagi Masyar akat yang Terkena Relokas i Progra m Kabupa ten/Kota	1.04 .02. 2.02 .000 7	100 ora ng	200 ora ng	300 ora ng	400 ora ng	500 ora ng	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Koordin asi untuk Menyep akati Peneri ma dan Jenis Pelayan an	1.04 .02. 2.02 .000 6	100 ora ng	200 ora ng	300 ora ng	400 ora ng	500 ora ng	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
							Pemb angu nan dan Reha bilitas i Ruma h Korba n	1.04 .02. 2.03	Juml ah ruma h yang diban gun dan direh abilita s	Rehabil itasi Rumah bagi Korban Bencan a	1.04 .02. 2.03 .000 1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
							Benca na atau Relok asi Progr am Kabu paten /Kota		Doku men lapora n hasil pemel ihara n peru maha n	Operasi onal dan Pemeli haraan Lingku ngan Peruma han pada Relokas i Progra m Kabupa	1.04 .02. 2.03 .000 6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
										ten/Kot a																
ISU STRATEGIS 3: Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim																										
Terintegr asinya upaya pengenta san kemiskin an di wilayah rawan bencana untuk meningka tkan ketanggu han masyarak at	Menuru nnya angka pengan nguran	Mema duka n penan ganan dan penan ggula ngan kemis kinan sebag ai upaya untuk menin gkatk an ketan gguha n masy araka t.	Terinte grasiny a upaya pengent asan kemiski nan di wilayah rawan bencan a untuk mening katkan ketangg uhan masyar akat	PROG RAM PERLI NDUN GAN DAN JAMI NAN SOSI AL	1.06. 05	Jumlah peneri ma manfaa t untuk perlind ungan sosial	Penge lolaan Data Fakir Miski n Caku pan Daera h Kabu paten /Kota	1.06 .05. 2.02	Juml ah peneri ma manfa at untuk perlin dunga n sosial	Pengelo laan Data Fakir Miskin Cakupa n Daerah Kabupa ten/Kot a	1.06 .05. 2.02 .000 8	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	100	100	100	100	100	Kota Kediri	DI N S O S		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
										Fasilita si Bantua n Pengem bangan Ekono mi Masyar akat	1.06 .05. 2.02 .000 4	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	200	200	200	200	200	Kota Kediri	DI N S O S		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
										Fasilita si Bantua n Jamina n Sosial bagi Pekerja	1.06 .05. 2.02 .000 9	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	200 0 KK	120 0	120 0	120 0	120 0	120 0	Kota Kediri	DI N S O S		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
										Rentan Miskin																Kota Kediri
																										SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
				PROG RAM PEMB ERDA YAAN USAHA MEN ENGA	2.17. 07	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.17 .07. 2.01 .001 4	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Kota Kediri	DIN KOP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri		

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				H, USAH A KECI L, DAN USAH A MIKR O (UMK M)		ketaha nan keluarg a terkait kawasa n rawan bencan a	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01	dan Sinkr onisa si denga n Para Pema ngku Kepen tinga n dalam Pemb erday aan Usah a Mikro	Koordin asi dan Sinkron isasi dengan Para Pemang ku Kepenti ngan dalam Pember dayaan Usaha Mikro	2.17 .07. 2.01 .000 5	I dok	I dok	I dok	I dok	I dok	20	20	20	20	20	Kota Kediri	DI N K O P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									Menu muhke mbangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tanggu h dan Mandiri Sehingg a dapat Mening katkan Pencipt aan Lapang an Kerja, Pemera taan	2.17 .07. 1.01 .000 1	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Kota Kediri	DI N K O P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									Pendap atan, Pertum buhan Ekono mi, dan Pengt asan Kemiski nan																
				PROG RAM PENG EMBA NGAN UMK M	2.17. 08	Usaha mikro pada daerah rawan bencan a yang mening kat omsetn ya.	Penge mban gan Usah a Kecil denga n Orien tasi Penin gkata n Skala Usah a Menja di Usah a Mene ngah	2.17 .08. 1.01	Juml ah UMK M yang pulih setela h terda mpak benca na	Penum buhan dan Pengem bangan Kewira usahaa n	2.17 .08. 1.01 .000 5	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Kota Kediri	DI N K O P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PRO GRA M PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DESA DAN KELU RAHA N	7.01. 03	Persent ase kegiata n pember dayaan dan peningk atan ketaha nan keluarg a terkait kawasa n rawan bencan a	Pemb erday aan dan Kesej ahter aan Kelua rga Tingk at Keca mata n dan Kelur ahan	7.01 .03. 2.06	Juml ah Kelua rga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelua rga dalam Penin gkata n Taraf Hidup Kelua rga melal ui Kehid upan Berko perasi dan Penge mban gan Ekon omi Lainn ya	Penum buan Kesada ran Keluarg a dalam Peningk atan Taraf Hidup Keluarg a Melalui Kehidu pan Berkop erasi dan Pengem bangan Ekono mi Lainnya	7.01 .03. 2.06 .000 8	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D P3 AP 2 K B		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegiat an	Sub Kegiatan	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PRO GRA M PEMB ERDA YAAN DAN PENI NGKA TAN KELU ARGA SEJA HTER A (KS)	2.14. 04	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga dikawasan rawan bencana	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14 .04. 2.01	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembiayaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (perse	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Banga	2.14 .04. 2.01 .002 3	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	Daerah Rawan Bencana	D P3 AP 2 K B		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	2.14 .04. 2.01 .002 1	75	75	75	75	75	150	150	150	150	150	Daerah Rawan Bencana	D P3 AP 2 K B		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Keluarga Akseptor (UPPKA)															
Penataan kawasan permuki man kumuh	Persentase penurunan luas kawasa n kumuh (%)	Revitalisasi kawasa n permukiman dan kumuh	Peningkatan program peremajaan dan penataan kawasa n kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	Persentase penanganan PSU kawasa n permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02	Jumlah data perumahan dan permukiman kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.0014	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10	10	10	10	10	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
									Jumlah dokumen Rencana Tumbuh dan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perm	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1.04.04.2.01.0008	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10	10	10	10	10	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									ukim an Kumu h																	
									Juml ah ruma h tidak layak huni yang diper baiki	Perbaik an Rumah Tidak Layak Huni	1.04 .03. 2.03 .000 2	50	50	50	50	50	500	500	500	500	500	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									Kelom pok masy araka t yang diting katka n kapas itasny a	Pemben tukan/ Pembin aan Kelomp ok Swaday a Masyar akat di Permuk iman Kumuh	1.04 .03. 2.02 .001 2	1 Kel	2 Kel	3 Kel	4 Kel	5 Kel	500	500	500	500	500	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
				PROG RAM PERU MAH AN DAN KAWA SAN	1.04. 04	Jumlah penang anan dampak bencan a dan kejadia n yang	Pence gahan Peru maha n dan Kawa san Perm	1.04 .04. 2.01	Juml ah Ruma h Tangg a yang Mend	Pelaksa naan Pembag ian Rumah Baru Layak Huni	1.04 .04. 2.01 .000 6	200	200	200	200	200	400 0	400 0	400 0	400 0	400 0	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD	

[illegible]

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									Juml ah Lapor an Hasil Penga wasa n dan Penge ndalia n dalam Rang ka pence gahan terha dap Kumu h dan berke mban gnya Peru maha n Kumu h dan Perm ukim an Kumu h Baru	Pengaw asan dan Pengen dalian dalam Rangka pencega han terhada p Kumuh dan berkem bangny a Peruma han Kumuh dan Permuk iman Kumuh Baru	1.04 .04. 2.01 .000 7	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10	10	10	10	10	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									Juml ah Orang yang Mengi kuti Penya daran Publi k Pence gahan Tumb uh dan Berke mban gnya Perm ukim an Kumu h	Penyad aran Publik Pencega han Tumbu h dan Berkem bangny a Permuk iman Kumuh	1.04 .04. 2.01 .000 8	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
									Juml ah Orang yang Mengi kuti Pemb erday aan Masy araka t dalam Rang ka	Pember dayaan Masyar akat dalam Rangka pencega han terhada p Kumuh dan berkem bangny a	1.04 .04. 2.01 .000 9	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
									pence gahan terha dap Kumu h dan berke mban gnya Peru maha n Kumu h dan Perm ukim an Kumu h Baru	Peruma han Kumuh dan Permuk iman Kumuh Baru															
Mengopti malkan penangan an persampa han di Kota Kediri	Kapasit as TPA dan volume pengelo laan sampah	- Optim alisas i penge lolaan samp ah berba sis 3R (Redu ce, Reuse , Recyc le) - Penge	- Pemban gunan infrastr uktur pengelo laan sampah di luar TPA (TPST, bank sampah) - Pengua tan kebijak	PROG RAM PENG ELOL AAN PERS AMPA HAN	2.11. 11	Persent ase pengelo laan persam pahan	Penge lolaan samp ah	2.11 .11. 2.01	Juml ah Masy araka t, Kelom pok Masy araka t atau Para Pihak Lainn ya yang Terlib at Aktif	Peningk atan Peran Serta Masyar akat dalam Pengelo laan Persam pahan Penang anan sampah melalui pemilah an dan pengola	2.11 .11. 2.01 .000 4	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	100	100	100	100	100	Kota Kediri	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
											2.11 .11. 2.01 .001 7	160 00 ton	170 00 ton	180 00 ton	190 00 ton	200 00 ton	400 0	400 0	400 0	400 0	400 0	Kota Kediri	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD

[illegible]

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Koordin asi dan Sinkron isasi Penyedi aan Prasara na dan Sarana Pengelo laan Persam pahan	2.11 .11. 2.01 .000 5	30	30	30	30	30	300	300	300	300	300	Kota Kediri	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
				PROG RAM PENG EMBA NGAN SISTE M DAN PENG ELOL AAN PERS AMPA HAN REGI ONAL	1.03. 04	Persentase infrastr uktur persam pahan yang dibang un	Penge mban gan Siste m dan Penge lolaan Persa mpah an di Kota Kediri	1.03 .04. 2.01	Juml ah saran a/pras aran persa mpah an di Kota Kediri	Peningk atan TPA/TP ST/SPA /TPS- 3R/TPS	1.03 .04. 2.01 .001 3	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	Kota Kediri	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Pember dayaan Masyar akat dalam Pengem bangan Sistem Pengelo laan Persam pahan	1.03 .04. 2.01 .001 8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Kota Kediri	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
										Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	1.03.04.2.01.0020	1	1	1	1	1	1100	1100	1100	1100	1100	Kota Kediri	D P U P R		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim	Adanya program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengaturan regulasi dan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim	Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) untuk menurunkan emisi GRK	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001	1 Dok					100					Kota Kediri	D L H K P		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
Terintegr asinya data pembang unan yang menduku ng pelaksan aan SPM sub kebencan an di kawasan rawan bencana	Nilai Sistem Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerit ah (SAKIP)	Optim alisas i imple menta si Siste m Akunt abilita s Kinerj a Insta nsi Pemer intah (SAKIP)	- Pemanf aatan teknolo gi inform asi dalam monitor ing dan evaluas i SPM - Peningk atan transpa ransi dan keterlib atan publik dalam pengaw asan kinerja pemerit ah	PROG RAM KEPE GAW AIAN DAER AH	5.03. 02	Persent ase pegawai dalam jabatan sesuai kompet ensi	Penge mban gan Komp etensi ASN	5.03 .02. 2.03	Juml ah ASN yang Menin gkat Kapas itasny a	Peningk atan Kapasit as Kinerja ASN	5.03 .02. 2.03 .000 1	600	600	600	600	600	10	10	10	10	10	Kota Kediri	B K PS D M		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
										Sosialis asi dan Penyeb aran Informa si Jabata n Fungsio nal ASN	5.03 .02. 2.03 .001 2	5 Kegi ata n	5 Kegi ata n	5 Kegi ata n	5 Kegi ata n	5 Kegi ata n	10	10	10	10	10	Kota Kediri	B K PS D M		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
	Keterse dian data yang terinteg rasi dan dapat diguna kan untuk	Melak ukan integrasi, sinkronisa si, sinergi i data antar pelak	Menjam in pelaksa naan integrasi, sinkronisa si, sinergi data antar	PROG RAM PENA NGG ULAN GAN BENC ANA	1.05. 03	Tersedi anya sistem pendata an bencan a daerah	Penat aan Siste m Dasar Penan ggula ngan Benca na	1.05 .03. 2.04	adanya siste m yang terint egrasi denga n baik dalam	Pengelo laan dan Pemanf aatan Sistem Informa si Kebenc anaan	1.05 .03. 2.04 .000 4	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	50	50	50	50	50	Kota Kediri (Kawasan Rawan Bencana)	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RENAS PB RPB JATIM RPJMD

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
	melaks anakan SPM Sub Urusan bencana	u pemb angu nan.	pelaku pemban gunan.						penda taan penan ggula ngan benca na																	Kota Kediri
						Tersedi anya data/in formasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokume n yang sah/leg al	Pelay anan Infor masi Rawan Benca na Kabupa ten/ Kota	1.05 .03. 2.01	adany a doku men pemu tahira n kajian risiko benca na	Penyus unan Kajian Risiko Bencana Kabupa ten/ Kota	1.05 .03. 2.01 .000 8			1 Dok				300		Kota Kediri	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri			
						Tersele nggara nya komuni kasi, informa si edukasi rawan bencana kepada masyar akat	Pelay anan Infor masi Rawan Benca na Kabupa ten/ Kota	1.05 .03. 2.01	Juml ah warga negar a terma suk kelom pok renta n di kawas an rawan benca na	Sosialis asi, Komuni kasi, Informa si dan Edukas i (KIE) Rawan Bencana Kabupa ten/ Kota (Per Jenis Ancama	1.05 .03. 2.01 .000 7	9 Lok asi	9 Lok asi	9 Lok asi	9 Lok asi	10 Lok asi	90	90	90	90	100	Kota Kediri (Kawasan Rawan Bencana)	B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PROG RAM PERE NCAN AAN, PENG ENDA LIAN DAN EVAL UASI PEMB ANGU NAN DAER AH	5.01. 02	Persent ase Integra si dokume n rencana kegiata n penang gulanga n bencan a kedala m dokume n perenca naan OPD, dokume n perenca naan daerah dan dokume n teknis	Penyu suna n Peren canaa n dan Penda naan	5.01 .02. 2.01	Juml ah Telaa han Doku men Peren canaa n Pemb angu nan Daera h Daera h	Kordina si Penelaa han Dokum en Perenca naan Pemban gunan Daerah dengan Dokum en Kebijak an Lainnya termas uk dokume n rencana penang gulanga n bencan a	5.01 .02. 2.01 .000 2	I dok	I dok	I dok	I dok	I dok	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B AP P E D A B PP K A D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri
									Juml ah Pelak sanaa n Foru m Peran gkat Daera h/Lin	Koordin asi Pelaksa naan Forum Perang kat Daerah /Lintas Perang	5.01 .02. 2.01 .000 4	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B AP P E D A B PP K A D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									tas Peran gkat Daera h	kat Daerah																
							Penge ndalia n, Evalu asi dan Pelap oran Bidan g Peren canaa n Pemb angu nan Daera h	5.01 .02. 2.03	Doku men hasil monit oring pelak sanaa n Renca na Penan ggula ngan Benca na	Koordin asi Pengen dalian Perenca naan dan Pelaksa naan Pemban gunan Daerah di Kabupa ten/Kot a	5.01 .02. 2.03 .000 1	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B A AP P E D A S E T D A		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									keter kaita n dan konsi stensi antar a peren canaa n, penga nggar an, pelak sanaa	Monitor ing, Evaluas i dan Penyus unan Lapora n Berkala Pelaksa naan Pemban gunan Daerah	5.01 .02. 2.03 .000 3	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B A AP P E D A S E T D A		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahunan					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
																	(Juta Rupiah)									
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29					
									n dan penga wasa n																	
				PROG RAM KOOR DINA SI DAN SINK RONI SASI PERE NCAN AAN PEMB ANGU NAN DAER AH	5.01. 03	Persent ase pemban gunan yang selaras dengan PB	Koord inasi Peren canaa n Bidan g Infras trukt ur dan Kewil ayaha n	5.01 .03. 2.03	Jumla h Lapora n Hasil Pelaks anaan Monito ring dan Evalua si Penyu sunan Doku men Perenc anaan Pemba nguna n	Pelaksan aan Monitori ng dan Evaluasi Penyusu nan Dokume n Perencan aan Pembang unan Perangk at Daerah Bidang Kewilaya han	5.01 .03. 2.03 .000 7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	Kota Kediri	B A AP P E D A S E T D A		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	
									Perang kat Daera h Bidang Kewila yahan	Koordina si Pelaksan aan Sinergita s dan Harmoni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah Bidang Kewilaya han	5.01 .03. 2.03 .000 8	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	20	20	20	20	20	Kota Kediri	B AP P E D A B PP K A D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri	

Sasaran	Indikat or Sasara n (Dampa k)	Strat egi	Arahan Kebijak an	Progr am	Nomenklatur Program	Indikat or Progra m	Kegia tan	Nomenklatur Program	Indik ator Kegia tan	Sub Kegiata n	Nomenklatur Program	Target Tahun					Pagu Indikatif					Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
																	(Juta Rupiah)								
												25	26	27	28	29	25	26	27	28	29				
				PROG RAM PENG EMBA NGAN PERU MAH AN	1.04. 02	Persentase pembangunan perumahan yang selaras dengan PB	Penerbitan Izin Pembangunan dan Penge mbangan Perumahan	1.04 .02. 2.06	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengen dalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04 .02. 2.06 .000 3	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10	10	10	10	10	Kota Kediri	D P K P B P B D		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB JATIM RPJMD Kota Kediri

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT
DAERAH
ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP 19840804 201001 2 042

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI